

LAPORAN STUDI

# **Pendidikan di Garis Depan:**

---

**Evaluasi Program Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan 2018**



LAPORAN STUDI

# Pendidikan di Garis Depan:

---

Evaluasi Program Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan 2018

**Penyusun:**

Tim Peneliti Article 33 Indonesia

Santoso | Sandy J. Maulana

Ramada Febrian | Lukman Hakim

**Judul Buku:**

LAPORAN STUDI

Pendidikan di Garis Depan:

Evaluasi Program Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan 2018

**Penyusun:**

Tim Peneliti Article 33 Indonesia

**Penyunting Bahasa:**

Atika Mayang Sari

**Desain Sampul & Penata Isi:**

Alfyandi

**Jumlah Halaman:**

52 + 14 halaman romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan Pertama, September 2019

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2019, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

# EXECUTIVE SUMMARY

Program afirmasi di daerah 3T dilakukan seiring dengan sembilan prioritas Program Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program prioritas tersebut di antaranya adalah Guru Garis Depan (GGD) yang menyediakan tambahan guru serta Sekolah Garis Depan (SGD) yang menyediakan sekolah baru dan revitalisasi ruang kelas, yang merupakan tema studi ini. Studi ini menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana desain kebijakan GGD dan SGD untuk mencapai tujuan yang diharapkan; (2) Bagaimana pelaksanaan Program GGD dan SGD di daerah; dan (3) Bagaimanakah dampak awal GGD dan SGD terhadap akses dan hasil pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah Propensity Score Matching (PSM), yaitu teknik untuk memilih subset dari kelompok kontrol yang memiliki karakteristik paling mirip dengan unit treatment. Studi ini juga didukung studi kualitatif di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Data yang digunakan antara lain adalah Dapodik, nilai UN, Susenas, data lokasi, dan data program.

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa: (1) Sekolah yang mendapatkan GGD bukan sekolah yang paling membutuhkan guru PNS meski sama-sama di daerah 3T; (2) Sekolah yang mendapatkan GGD secara signifikan meningkatkan kecukupan guru PNS di daerah tersebut; (3) GGD tidak berdampak terhadap rata-rata nilai UN, namun berdampak pada penurunan ketimpangan nilai UN antar siswa di dalam satu sekolah; dan (4) tidak ada dampak SGD terhadap peningkatan probabilitas siswa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil dari studi ini memberikan masukan bahwa program ini atau sejenis perlu diteruskan di kemudian hari, dengan berbagai perbaikan, termasuk tentang mekanisme rekrutment, alokasi dan formulasi. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain adalah mengembangkan mekanisme yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengalokasian guru GGD. Selain itu, aspek-aspek seperti budaya, agama, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan seleksi atas guru GGD. Latar belakang pendidikan yang nantinya berpotensi menjadi masalah dalam hubungannya dengan perolehan sertifikasi dan tunjangan profesi perlu dipertimbangkan dalam rekrutmen guru GGD.



# DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Penelitian .....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Program Pendidikan di Daerah Terpencil .....	9
2.2 Pengalaman Negara Lain .....	11
3. PENDEKATAN DAN METODE.....	13
3.1 Metode Penelitian .....	15
3.1.1 Metode Evaluasi Dampak .....	15
3.1.2 <i>Propensity Score Matching</i> .....	16
3.1.3 Model Empiris GGD.....	17
3.1.4 Model Empiris SGD.....	18
3.1.5 Metode Kualitatif Studi Kasus .....	18
3.2 Sumber Data.....	19
3.2.1 Data primer .....	19
3.2.2 Data sekunder dan Proses Konsolidasi dan Penggabungan Data .....	19
4. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI.....	23
4.1 Desain Kebijakan Guru Garis Depan dan Sekolah Garis Depan .....	25
4.1.1 Program Guru Garis Depan .....	27
4.1.2 Program Sekolah Garis Depan (SGD).....	32
4.2 Model Empiris Evaluasi DampakSGD dan GGD.....	34
4.2.1 Evaluasi Dampak GGD .....	34
4.2.2 Evaluasi Dampak SGD .....	36

4.3	Studi Kasus: Kabupaten Sumba Timur .....	38
4.3.1	Pra Penempatan GGD .....	38
4.3.2	GGD di Sekolah Penempatan .....	40
4.3.3	Aspek kehidupan GGD dan interaksi dengan masyarakat.....	43
4.3.4	Peran Dinas Pendidikan .....	45
5.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	47
5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Rekomendasi .....	50
	REFERENSI.....	51
	LAMPIRAN .....	53

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kebijakan Pendidikan di Daerah Terpencil Kabinet Kerja .....	5
Tabel 2	Penelitian Terdahulu tentang Program Pendidikan di Wilayah 3T .....	10
Tabel 3	Sumber Data Sekunder Analisis Kuantitatif GGD dan SGD .....	19
Tabel 4	Matriks Kerangka Kebijakan Publik GGD dan SGD .....	26
Tabel 5	Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN), SMP .....	35
Tabel 6	Hasil Regresi: Ketimpangan Nilai UN Intra-Sekolah, SMP .....	35
Tabel 7	Hasil Regresi (SGD): Probabilitas Melanjutkan ke SMP .....	37
Tabel 8	Hasil Regresi (SGD): Probabilitas Melanjutkan ke SMA.....	37
Tabel 9	Contoh Pendapatan dan Pengeluaran Guru Garis Depan (GGD).....	43
Tabel 10	Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) per SMA.....	53
Tabel 11	Hasil Regresi: Ketimapanagn Nilai Ujian Nasional (UN) Intra-Sekolah SMA .....	53
Tabel 12	Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) per SMK.....	54
Tabel 13	Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) Intra-Sekolah SMK .....	54



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Kebijakan Publik .....	26
Gambar 2 Guru Garis Depan Menurut Jenjang Pendidikan.....	29
Gambar 3 Guru Garis Depan Menurut Gender.....	29
Gambar 4 Tahun Lulus Guru Peserta GGD 2017 .....	30
Gambar 5 Rasio Siswa-Guru PNS Tahun 2016 di Sekolah Program GGD 2017 dan Non-GGD.....	31
Gambar 6 Perbandingan Rasio Siswa-Guru PNS di Sekolah GGD (Sekolah yang Mendapat Program GGD 2017).....	32
Gambar 7 Sebarang Sekolah Penerima Program SGD .....	33
Gambar 8 Perubahan Jumlah Siswa SMP Tahun 2016-2017 Penerima Program SGD 2017 .....	34



# KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang besar untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia di manapun mereka berada dan dari kelompok ekonomi manapun untuk dapat menikmati pelayanan Pendidikan. Program guru garis depan (GGD) dan sekolah garis depan (SGD) yang merupakan tema dalam studi ini merupakan bentuk perwujudan dari komitmen tersebut untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini juga merupakan terjemahan paling dekat atas apa yang disebut sebagai membangun dari pinggiran.

Studi ini merupakan sebuah upaya secara terus menerus untuk melakukan perbaikan atas program pemerintah terutama program yang ditujukan bagi kelompok yang relatif tertinggal dalam proses pembangunan. Hasil studi ini diharapkan memberikan masukan yang penting dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program yang berhubungan dengan penempatan guru di wilayah 3T maupun pengalokasian bantuan sarana prasarana di wilayah tersebut.

Studi ini berjalan atas bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih terutama ditujukan untuk tim Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta tim dari Direktorat lain di lingkungan Kemendikbud. Terima kasih yang sangat besar diberikan untuk kerja sama yang baik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur serta guru GGD yang menjadi informan dalam studi, termasuk tim sekolah lain: guru, siswa, kepala sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk tim studi Article 33 Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses pengambilan data, analisis data, dan pelaporan, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya.

Salam Hormat,

Santoso,  
Direktur Eksekutif  
Article 33 Indonesia



# 1. PENDAHULUAN

---





## 1.1 Latar Belakang

Selama lebih dari satu dekade terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat signifikan. Pada tahun 1950, masyarakat Indonesia berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata sekolah kurang dari 2 tahun, meningkat menjadi 4 tahun pada tahun 1990, dan menjadi 8 tahun pada tahun 2015. Dalam hal jumlah partisipasi sekolah, jumlah siswa meningkat lebih dari 10 juta (25 persen), dan sebagian besar dalam pendidikan menengah. Antara tahun 2002 dan 2017, partisipasi sekolah di kalangan anak usia 16 hingga 18 meningkat dari 50 persen menjadi 71 persen. Tingkat partisipasi kelompok masyarakat yang relatif lebih miskin meningkat hampir dua kali lipat dari 32 persen menjadi 57 persen, sehingga kesenjangan dalam partisipasi sekolah dalam kelompok usia 16-18 tahun antara kelompok termiskin dan terkaya menurun, dari 37 menjadi 25 poin persentase (IEQ, The World Bank, 2018).

Sementara dalam hal kualitas pendidikan, berbagai studi menunjukkan masih adanya tantangan, meski berbagai capaian kemajuan juga harus diakui. Di antara negara-negara yang berpartisipasi PISA, Indonesia mencatat kenaikan yang tertinggi dalam matematika antara tahun 2003 dan 2015, seiring dengan peningkatan yang tinggi dalam partisipasi sekolah di Indonesia dengan masuknya para siswa dari kondisi sosial ekonomi rendah ke dalam sistem pendidikan. Namun demikian, nilai PISA secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan yang diperkirakan menurut tingkat penghasilan Indonesia. Sementara dalam TIMSS, nilai matematika rata-rata siswa kelas 8 Indonesia menurun 17 poin dari tahun 1999 hingga 2011 (IEQ, The World Bank, 2018).

Dalam penyediaan layanan publik, di hampir semua negara akan selalu terdapat kelompok masyarakat yang harus diberi perlakuan berbeda karena faktor-faktor yang melekat pada masyarakat tersebut seperti misalnya letak geografis atau kondisi ekonomi. Tugas negara adalah memberi layanan pada seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi asas keadilan yang menjadi amanat konstitusi. Mereka yang berada di wilayah yang sulit secara geografis yang biasa dikenal dengan wilayah tertinggal (infrastruktur yang relatif kurang), terdepan (berada di daerah perbatasan dengan negara lain), dan terluar (letaknya terpencil) perlu mendapatkan perlakuan khusus atau yang disebut dengan program afirmasi. Program afirmasi tidak hanya untuk memenuhi rasa keadilan, namun juga memungkinkan mereka untuk dapat bersaing dalam mencapai prestasi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah di manapun mereka berada dan berasal dari latar belakang apapun mendapatkan

pelayanan Pendidikan yang berkualitas. Hal ini termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa arah kebijakan di sektor pendidikan adalah:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatkan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatkan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. Meningkatkan jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
9. Meningkatkan dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
10. Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Program afirmasi di daerah 3T juga dilakukan seiring dengan sembilan prioritas Program Nawacita ke tiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo menetapkan beberapa program prioritas di sektor pendidikan untuk melakukan afirmasi di wilayah 3T. Program prioritas tersebut diantaranya adalah sekolah garis depan yang menyediakan sekolah baru dan revitalisasi ruang kelas, guru garis depan yang menyediakan tambahan guru, bantuan sarana Pendidikan untuk alat-alat pembelajaran, kartu Indonesia pintar berupa bantuan personal bagi mereka yang masuk dalam kategori miskin, Pendidikan vokasi di daerah 3T, revitalisasi desa adat dalam bentuk bantuan keuangan bagi desa tersebut, pengiriman sastrawan berkarya di daerah 3T, dan implementasi PPK di daerah 3T. Deskripsi program dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam penelitian ini, fokus utama analisis terdapat pada dua program yaitu Guru Garis Depan (GGD) dan Sekolah Garis Depan (SGD). Pemilihan dua program ini dikarenakan keterlibatan anggaran yang cukup besar dan signifikansi pada pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan.

Tidak banyak penelitian atas kedua program tersebut yang telah dilakukan. Program GGD yang secara resmi akan berakhir pada 2018 – meski akan dilanjutkan dengan program yang sejenis – membutuhkan evaluasi yang dapat mengindikasikan apakah program tersebut memberi hasil seperti yang diharapkan atau tidak. Hal yang sama juga untuk program SGD. Identifikasi atas permasalahan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program akan sangat membantu dalam merumuskan program lanjutan yang sejenis.

**Tabel 1 Kebijakan Pendidikan di Daerah Terpencil Kabinet Kerja**

<b>Sekolah Garis Depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun 11 unit sekolah baru, merevitalisasi 103 sekolah, lokakarya peningkatan pemanfaatan TIK untuk 1800 guru di 114 SGD.</li> </ul>
<b>Guru Garis Depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2015 sebanyak 798 guru di kirim ke 28 kabupaten di daerah 3T. Tahun 2017 sebanyak 6.296 guru di kirim ke 93 kabupaten di daerah 3T. Tahun 2018 merencanakan perekrutan untuk 9.086 guru dengan sasaran guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdikan di sekolah 3T.</li> </ul>
<b>Bantuan Sarana Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2017, sebanyak 16.772 paket peralatan pendidikan diberikan ke sekolah-sekolah di Indonesia. Peralatan tersebut terdiri dari alat peraga pembelajaran, peralatan laboratorium, dan peralatan TIK. Kemdikbud juga menyalurkan alat kesenian senilai 19,8 miliar untuk 220 sekolah di 31 provinsi. Masing-masing sekolah mendapatkan seperangkat alat kesenian tradisional dan modern senilai 90 juta. Bantuan alat musik juga diberikan bagi sekolah hasil kerja sama Kemdikbud dengan PT. Yamaha Music Indonesia Distributor.</li> </ul>
<b>Kartu Indonesia Pintar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penerima KIP tahun 2017 untuk jenjang SD ada sebanyak 10.360.614 peserta didik, jenjang SMP sebesar 4.369.968 peserta didik, jenjang SMA sebesar 1.375.458 peserta didik, dan untuk jenjang SMK ada sebesar 1.879.617 peserta didik.</li> </ul>
<b>Pendidikan Vokasi di Daerah 3T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2017, terdapat 50 SMK kelautan dan pariwisata, 100 SMK pertanian, 200 teaching factory dan 20 techno park. 1.540 SMK telah bekerja sama dengan industri dan 1.280 melakukan penyaluran kejuruan. Sebanyak 580 SMK menerima bantuan peralatan praktik.</li> </ul>
<b>Revitalisasi Desa Adat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2015, sebanyak 132 desa adat telah di revitalisasi, tahun 2016 sebanyak 139 desa, tahun 2017 sebanyak 67 desa. Dana di transfer langsung ke rekening desa, jumlah berkisar 100-400 juta.</li> </ul>
<b>Pengiriman Sastrawan Berkarya ke Daerah 3T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2016, sebanyak 5 sastrawan dikirim ke 5 daerah 3T, 1 ke Meksiko. Tahun 2017, sebanyak 6 sastrawan di kirim ke 6 daerah 3T.</li> </ul>
<b>Implementasi PPK di Daerah 3T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hingga saat ini, implementasi PPK dilakukan pada sekitar 60 ribu sekolah.</li> </ul>

Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

## 1.2 Tujuan Penelitian

Setelah berjalan sejak tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi atas program GGD dan SGD untuk mengetahui bagaimana kemajuan dan manfaatnya bagi pendidikan. Belum banyak studi yang dilakukan untuk melihat apakah program GGD dan SGD memberikan dampak seperti yang diharapkan oleh program tersebut.

Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain kebijakan GGD dan SGD untuk mencapai tujuan yang diharapkan?
2. Bagaimana pelaksanaan Program GGD dan SGD di daerah?
3. Bagaimanakah dampak awal GGD dan SGD terhadap akses dan hasil pembelajaran?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

---





## 2.1 Program Pendidikan di Daerah Terpencil

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dengan luas wilayah daratan dan lautan mencapai 5.193.250 km<sup>2</sup> dengan beragam etnis, budaya, bahasa dan agama, sangat rentan terjadinya disintegrasi. Tingkat kerawanan disintegrasi semakin besar jika pembangunan sosial dan ekonomi dilakukan tidak merata dan berkeadilan. Berdasarkan data Kementerian Desa tahun 2015 masih banyak daerah tertinggal di Indonesia, ada sekitar 122 daerah dengan 39.091 desa yang masih dalam kategori kurang berkembang. Ini berarti bahwa jumlah desa tertinggal di Indonesia di pulau-pulau besar adalah di kisaran 52,79% dari total basis di wilayah terbesar di Indonesia.

Menurut Malihah & Tanszil (2017), untuk menyeimbangkan pertumbuhan antardaerah, tujuan pembangunan di Indonesia adalah (a) Mencapai keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhan; (b) Memperkuat ekonomi nasional; dan (c) Mempertahankan efisiensi pertumbuhan nasional. Keseimbangan pembangunan antardaerah akan memenuhi keadilan sosial, mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, dan bagian untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia sebagai stabilisasi Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara merupakan perspektif dan sikap Indonesia secara keseluruhan, dan lingkungan geografis negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengembangan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal merupakan salah satu strategi mengembangkan wawasan nusantara yang salah satunya melalui gerakan sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM-3T). Program SM-3T adalah Program Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pengembangan pendidikan di area terdepan, terluar dan tertinggal selama satu tahun sebagai persiapan guru profesional yang akan diikuti oleh Program pendidikan profesi guru. Program SM-3T adalah program bersama untuk mendidik Indonesia berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat pengembangan pendidikan di area 3T. Program SM-3T memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membantu 3T bidang dalam mengatasi masalah pendidikan terutama kekurangan pendidik;
2. Memberikan pengalaman dedikasi kepada lulusan pendidikan membentuk sikap profesional, cinta negara, membela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah pendidikan, dan bertanggung jawab atas kemajuan bangsa, dan memiliki semangat ketahanan dalam mengembangkan pendidikan di daerah digolongkan sebagai 3T;

3. Persiapkan calon pendidik yang ingin mengabdikan diri sebagai pendidik profesional di bidang 3T;
4. Persiapkan calon pendidik profesional sebelum bergabung dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Malihah & Tanszil (2017) melakukan evaluasi program SM-3T terhadap tujuan-tujuan program dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam studi tersebut adalah hasil wawancara dengan lulusan baru yang telah berpartisipasi dalam program SM-3T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SM-3T berdampak: (1) memperkuat POSYADA menjadi lebih variatif dan menyenangkan; (2) meningkatkan kemampuan membaca dan lebih mencintai tanah air; (3) menjadi strategi pembangunan di bidang pendidikan dengan mengurangi kesenjangan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pendidikan. Kekurangan dari program SM-3T (1) masa mengajar hanya 1 tahun sehingga tidak mungkin mengubah kualitas SDM; dan (2) perlu kualitas guru yang sangat baik.

Kesimpulan studi tersebut adalah program penempatan guru berkualitas di daerah terpencil memiliki peran penting dalam meningkatkan visi kepulauan partisipan sebagai hasil dari pendekatan geopolitik yang tertanam melalui kebijakan pendidikan di beberapa daerah tertinggal di Indonesia.

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu tentang Program Pendidikan di Wilayah 3T**

Penulis, judul, publikasi/Jurnal	Tujuan	Temuan
Rahmi Rivalina, Peran Guru Garis Depan Dalam Mengembangkan Sekolah Efektif, Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 30 No. 2. Oktober 2016	Menghasilkan pemikiran yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan peran GGD, mengembangkan sekolah tempat bertugas menjadi sekolah efektif	Hasil penelitian yang dilakukan di Aceh Timur mengungkapkan beberapa peran GGD yang perlu dioptimalkan, yaitu yang berkaitan dengan (1) kepala sekolah, (2) guru mitra, (3) peserta didik, (4) orangtua/masyarakat, dan (5) sesama GGD. Keberadaan GGD sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan melalui pengembangan sekolah efektif di Kabupaten Aceh Timur
E Malihah dan W Tanszil, Scholars Remote Teaching Service: Indonesia's Geopolitical Strategy, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 145 012008. 2018	Menilai kebijakan SM-3T	Program SM-3T memiliki peran penting dalam peningkatan visi kepulauan partisipan sebagai hasil dari pendekatan geopolitik yang tertanam melalui kebijakan pendidikan di beberapa daerah tertinggal di Indonesia.

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu tentang Program Pendidikan di Wilayah 3T (lanjutan)**

Penulis, judul, publikasi/Jurnal	Tujuan	Temuan
Ferry Efendi, Retno Indrawati, Anna Kurniati, Rizki Fitriyasaki PK, Ah. Yusuf, Susan Nancarrow, "Retaining and Motivating Health Worker in Very Remote Area of Indonesia, Do They Respond to The Incentives?", GSTF International Journal of BioSciences (JBio) Vol.2 No.1. 2012	Menaksir aplikasi skema insentif berdasarkan lokasi kerja	Dari hasil studi literatur, insentif dalam bentuk finansial dan non finansial adalah penting. Namun, insentif finansial saja tidak cukup untuk mempertahankan dan memotivasi tenaga kerja kesehatan. Sistem insentif harus diintegrasikan dengan sistem kesehatan, sejalan dengan tujuan dan sasaran pengembangan kesehatan di Indonesia. Peran kepemimpinan lokal di bawah desentralisasi juga penting untuk memotivasi dan memelihara staf di tempat kerja. Skema insentif yang berbeda antara karyawan kontrak dan karyawan tetap di daerah terpencil harus ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan program.

## 2.2 Pengalaman Negara Lain

Dalam studi yang dilakukan oleh CARE tahun 2014 di Papua Nugini ditemukan bahwa meskipun kebijakan pendidikan sudah ada, akan tetapi dalam proses implementasinya sulit untuk sampai di daerah terpencil. Studi yang dilakukan di Kabupaten Obura Wonenara tersebut menemukan peluang perempuan untuk menikmati pendidikan lebih terbatas. Selain memakan waktu sehari-hari untuk sampai di kelas, isu lain yang menghambat mereka adalah keberadaan norma budaya dan masalah keamanan yang serius.

Di kabupaten tersebut, meskipun banyak anak usia sekolah, guru dan sekolah yang tersedia sangat terbatas. Guru lokal jumlahnya tidak banyak, dan hampir seluruhnya tidak memiliki kualifikasi yang memadai, bahkan akses ke pelatihan guru pun mereka tidak punya. Guru-guru yang datang dari luar daerah tidak tinggal untuk waktu yang lama karena perbedaan budaya dan kurangnya dukungan, sumber daya, dan infrastruktur komunikasi. Dan lagi, mereka yang bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan ke guru-guru dan membangun sekolah sering tidak memiliki anggaran untuk mendukung aspek ini di daerah terpencil. Batasan-batasan inilah yang kemudian membuat tingkat literasi di daerah tersebut sangat rendah (CARE, 2018).

Guru memiliki dampak yang paling besar dalam proses belajar murid (Hattie, 2009). Memiliki guru berkompentensi tinggi berperan penting terhadap peningkatan capaian murid di sekolah dan dalam proses transisi mereka untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, hingga di pekerjaan. Pendidikan di Australia, termasuk pelatihan dan persiapan tenaga guru adalah tanggung jawab negara dan daerah. Pengaturan guru oleh daerah dan negara termasuk melakukan akreditasi pendidikan awal guru dan membuat standar minimum untuk tenaga guru. Ketika guru tersebut sudah bekerja di sekolah, maka induk semang bertanggung jawab menyiapkan lingkungan

pekerjaan, ketersediaan sumber daya untuk melakukan pengembangan profesi. Pemerintah juga melakukan investasi dalam bentuk program dan insentif kepada guru berkualitas untuk mau ditempatkan di daerah terpencil. Misalnya, Australia Barat memberikan tambahan tunjangan sebanyak 20.870 Dollar Australia per tahun, biaya relokasi dan tempat tinggal, serta cuti tambahan agar guru-guru mau pindah dan mengajar di daerah yang terpencil. Memikat dan mempertahankan guru-guru terbaik di daerah terpencil menjadi tantangan yang terus-menerus dihadapi dalam agenda pendidikan (Halsey, 2018).

Temuan Chansopheak (2009) menyebutkan bahwa dalam reformasi pendidikan di Kamboja, faktor penting yang membuat reformasi pendidikan yang sudah berlangsung selama 7 tahun gagal adalah karena diabaikannya peran guru. Reformasi pendidikan mengharapkan guru untuk menyelenggarakan reformasi tanpa membahasakan hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Norma-norma pekerjaan guru dan lingkungan kerjanya tidak diperhatikan, serta profesionalisme guru, dan perilaku mereka tidak menjadi perhatian dalam agenda kebijakan. Kompensasi yang memadai tidak hanya tentang waktu guru di kelas dalam mengajar, akan tetapi waktu-waktu lain yang mereka gunakan dalam menyusun bahan pembelajaran dan penelitian, pekerjaan administratif seperti merekam proses dan kemajuan murid. Selain kompensasi dalam bentuk uang yang sudah menjadi syarat, kebijakan juga harus membuat ukuran yang jelas dalam pengembangan dan inovasi pengajaran oleh guru, termasuk ukuran yang mendorong aplikasi dari pengajaran itu secara konsisten.

### 3. PENDEKATAN DAN METODE

---





## 3.1 Metode Penelitian

### 3.1.1 Metode Evaluasi Dampak

Isu utama dalam melakukan evaluasi dampak adalah bagaimana membuat pembandingan (*counterfactual outcome*) untuk objek yang sama tanpa intervensi. Namun, karena dalam kondisi aktual pembandingan tersebut tidak akan pernah bisa diobservasi karena ketidakmungkinan adanya dua *outcome* pada waktu yang sama, maka estimasi pembandingan tersebut harus melibatkan teknik statistik. Teknik statistika tersebut digunakan untuk memilih kelompok kontrol yang karakteristiknya sangat mirip dengan unit perlakuan (*treatment*).

Salah satu teknik statistika yang banyak digunakan untuk membuat *counterfactual outcome* adalah dengan metode eksperimen layaknya di penelitian ilmu alam. Pada eksperimen yang melibatkan randomisasi unit treatment dan kontrol, maka *counterfactual* dari unit kontrol merupakan kelompok pembandingan yang valid. Hal tersebut karena unit treatment dipilih dengan cara yang random, tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan lainnya, sehingga masalah *self-selection bias* (bias yang terjadi karena pemilihan sampel tidak dilakukan secara random) menjadi tidak muncul pada metode eksperimen.

Pada konteks penelitian sosial, eksperimen tidak selalu dapat digunakan karena beberapa alasan. Pertama, eksperimen membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan juga kadang melibatkan persoalan etika mengenai eksperimen karena objek penelitiannya adalah manusia. Kedua, selain membutuhkan sumber daya yang banyak, eksperimen harus dirancang pada saat jauh sebelum kebijakan atau treatment terjadi. Pada studi evaluasi dampak di ilmu sosial yang melibatkan kebijakan atau program, terkadang kebijakan yang ingin dievaluasi sudah atau sedang terjadi. Oleh karena itu, metode eksperimen tidak dapat digunakan.

Terdapat beberapa metode evaluasi dampak yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan untuk yang sedang atau sudah terjadi. Misalnya, *Propensity Score Matching* (PSM), *Difference-in-Difference* (DID), atau *Regression Discontinuity Design* (RDD). Setiap metode cocok untuk setting kebijakan atau program tertentu dan mungkin tidak cocok untuk program yang lain. DID adalah suatu bentuk *quasi-experiment* untuk mengestimasi dampak perlakuan tertentu dengan membandingkan perubahan outcome antarwaktu antara kelompok perlakuan dan kelompok pembandingan. Dimensi waktu sebelum dan sesudah dapat juga diganti dengan dimensi atau variabel yang lain. Salah satu contoh penggunaan DID adalah studi yang dilakukan oleh Article 33 Indonesia untuk melakukan evaluasi dampak dana desa. Studi ini membandingkan kelompok yang mendapat dana desa dengan kelompok yang tidak mendapatkan dana desa, sebelum dan sesudah program dana desa berjalan. Studi ini dapat mengidentifikasi dampak dana desa terhadap sejumlah outcome yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan kesenjangan antar kelompok masyarakat (Article 33 Indonesia, 2018).

RDD yang pertama kali dikenalkan oleh Donald L. Thistlethwaite and Donald T. Campbell tahun 1960 adalah cara untuk mengestimasi dampak dari suatu perlakuan dalam studi non-eksperimental dimana hasilnya ditentukan oleh apakah indikator outcome dalam kelompok perlakuan melebihi titik potong (Lee and Lemieux, 2010). Metode RDD sangat cocok jika pembagian antara unit treatment dan kontrol menggunakan satu indeks yang mana *cut-off* dari kedua kelompok terbagi dengan jelas dan definitif. Perbedaan atas skor outcome antara dua kelompok tersebut (yang ditunjukkan dengan adanya diskontinuitas garis regresi) menunjukkan dampak dari perlakuan. Studi yang dilakukan Samer, et.al (Economics of Education Review, 2018) tentang dampak biaya operasional Pendidikan berbasis kinerja terhadap hasil belajar siswa di Jakarta, salah satunya dengan menggunakan pendekatan RDD. Dengan metode ini, dapat diidentifikasi perbedaan nilai ujian nasional (UN) sebagai outcome antara sekolah yang tepat berada di *cut-off* antara kelompok yang mendapatkan program dan kelompok yang tidak mendapatkan program.

### 3.1.2 *Propensity Score Matching*

Pada studi evaluasi dampak program Pendidikan di daerah 3T ini akan digunakan metode *Propensity Score Matching* (PSM). Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa unit treatment untuk kedua program, baik SGD dan GGD tidak memiliki *cut-off* yang jelas mengapa suatu daerah menerima alokasi SGD atau GGD. Dalam konteks GGD, metode evaluasi dampak harus digunakan karena terdapat pandangan bahwa suatu daerah mendapatkan alokasi GGD juga karena daerah tersebut berminat untuk menjadi daerah target (kemudian dilanjutkan dengan pembuatan MoU dengan Kemendikbud)<sup>1</sup>. Oleh karena itu, terdapat *self-selection* bias pada level kabupaten yang berpartisipasi ke dalam GGD. Hal ini juga patut diduga bahwa alokasi sekolah mana yang mendapatkan GGD pada intra-district juga tidak random dan terdapat *selection bias*.

Secara singkat, metode PSM adalah teknik untuk memilih subset dari kelompok kontrol yang memiliki karakteristik paling mirip dengan unit treatment. Dengan memilih kelompok kontrol yang dianggap paling dekat karakteristiknya, dampak dari suatu program atau kebijakan dapat dideteksi dengan menghitung selisih rata-rata dari kelompok treatment dan kontrol. Secara sederhana, kemiripan tersebut dapat diidentifikasi dengan satu variabel kunci, misalnya dalam konteks Pendidikan adalah sekolah yang mendapatkan treatment dan menjadi kontrol dipilih berdasarkan ukuran sekolah (*school size*) yang mirip.

Masalah metode *matching* yang sederhana dengan satu variabel kunci tersebut adalah jika karakteristik yang berpengaruh mempunyai kemiripan lebih dari satu. Jika variabel karakteristiknya jamak, diperlukan suatu metode untuk *scoring* atau komposit dari seluruh variabel tersebut sehingga diperoleh satu nilai yang merefleksikan kemiripannya. PSM adalah metode yang dapat menjawab masalah tersebut dengan membuat *propensity-score* dari satu set variabel karakteristik di sisi treatment dan kontrol dan membuatnya menjadi satu dimensi (Heinrich, Maffioli, & Vazquez, 2010).

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara pemangku kepentingan (Stakeholders Interview) dengan Tim Kemendikbud, pada 7 November 2018

Pada model PSM, *propensity-score* diperoleh dengan melakukan regresi model kualitatif (Logit atau Probit) karena status treatment dan kontrol berupa variabel biner (0,1) (Heinrich, Maffioli, & Vazquez, 2010). Dari hasil regresi tahap pertama tersebut, akan dihasilkan suatu *propensity-score* yang dapat digunakan dalam memilih subset kelompok kontrol yang akan dimasukkan ke dalam analisis evaluasi dampak.

Terdapat dua masalah terkait dengan metode PSM, yaitu masalah model seleksi dan memilih algoritma kecocokan (*matching algorithm*). Pertama, variabel karakteristik apa saja yang akan dimasukkan ke dalam regresi untuk mendapatkan *propensity-score* atau spesifikasi dari model seleksi (Heinrich, Maffioli, & Vazquez, 2010). Idealnya model seleksi mencakup sebagian besar faktor-faktor yang menentukan perbedaan antara unit kontrol dan *treatment*. Salah satu variabel yang penting untuk dimasukkan ke dalam model seleksi adalah faktor yang mempengaruhi mengapa suatu unit diputuskan atau berpartisipasi ke dalam kebijakan atau program (Heinrich, Maffioli, & Vazquez, 2010). Dalam konteks GGD, faktor yang dipertimbangkan salah satunya adalah Rasio Guru-Siswa (STR) karena hal tersebut salah satu kriteria yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menentukan sekolah yang masuk ke dalam program.

Masalah kedua dalam PSM adalah bagaimana memilih algoritma kecocokan. Setelah memilih model seleksi dengan spesifikasi variabel karakteristik yang pas, algoritma yang digunakan untuk menentukan kedekatan atau kemiripan antara unit treatment dan kontrol adalah hal penting lainnya. Idealnya terdapat empat faktor utama yang dipertimbangkan ketika memilih alternatif algoritma tersebut (Heinrich, Maffioli, & Vazquez, 2010), yaitu: (1) *matching* dengan atau tanpa penggantian (*replacement*); (2) standar untuk kedekatan atau *proximity*; (3) apakah akan melakukan pembototan; dan (4) jumlah unit kontrol yang cocok atau mirip dengan setiap unit treatment.

### 3.1.3 Model Empiris GGD

$$\mu_{UN} = \beta_0 + \beta_1 GGD + \beta_2 STR + \beta_3 \% \text{ Ruang kelas baik} + \beta_4 \% \text{ Guru S1} + \beta_5 \text{ Guru PNS} + \varepsilon$$

$$\sigma_{UN} = \beta_0 + \beta_1 GGD + \beta_2 STR + \beta_3 \% \text{ Ruang kelas baik} + \beta_4 \% \text{ Guru S1} + \beta_5 \text{ Guru PNS} + \varepsilon$$

#### Definisi Operasional Variabel

$\mu$	: Rata-rata nilai UN masing-masing sekolah; UN = {Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan Total nilai UN}
$\sigma$	: Standar deviasi nilai UN di masing-masing sekolah; UN = {Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan Total nilai UN}
GGD	: 1 = Sekolah mendapatkan GGD, 0 = Sekolah tidak mendapat GGD
STR	: Rasio jumlah murid dengan guru
% ruang kelas baik	: Persentase ruang kelas baik terhadap total ruang kelas masing-masing sekolah
% guru S1	: Persentase guru S1 terhadap total guru masing-masing sekolah
% guru PNS	: Persentase guru PNS terhadap total guru masing-masing sekolah

### 3.1.4 Model Empiris SGD

$$Pr_{SMP} = \beta_0 + \beta_1 SGD + \beta_2 \text{Pekerja formal} + \beta_3 \% \text{Pend. KRT} + \beta_4 \% \text{Usia} + \beta_5 \text{Perkotaan} + \beta_6 \text{Aset} + \beta_7 \text{SGD} * \text{Perkotaan} + \varepsilon$$

$$Pr_{SMA} = \beta_0 + \beta_1 SGD + \beta_2 \text{Pekerja formal} + \beta_3 \% \text{Pend. KRT} + \beta_4 \% \text{Usia} + \beta_5 \text{Perkotaan} + \beta_6 \text{Aset} + \beta_7 \text{SGD} * \text{Perkotaan} + \varepsilon$$

#### Definisi Operasional Variabel

<i>Pr</i>	: 1 = Anak yang sedang atau pernah SMP dimana tahun sebelumnya anak tsb juga bersekolah, 0 = Sebaliknya
<i>Pr</i>	: 1 = Anak yang sedang atau pernah SMA dimana th sebelumnya anak tsb juga bersekolah, 0 = Sebaliknya
SGD	: 1 = Kabupaten/Kota anak tinggal terdapat SGD, 0= Sebaliknya
Pekerja	: 1 = Formal, 0 = Tidak formal
Pend. Kepala RT	: 1 = Dasar, 2 = Menengah, 3 = Menengah Atas, 4 = Tinggi
Usia	: Usia kepala rumah tangga
Perkotaan	: 1 = Perkotaan, 0 = Perdesaan
Aset	: 1 = Jika rumah tangga memiliki mobil, 0 = Sebaliknya
Exp_cap	: Total pengeluaran makanan dan non makanan per bulan dibagi jumlah anggota rumah tangga
SGD*Perkotaan	: 1 = Sekolah Garis Depan yang berada di wilayah perkotaan, 0 = Sebaliknya

### 3.1.5 Metode Kualitatif Studi Kasus

Selain analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, studi ini juga didukung oleh analisis data kualitatif. Studi kualitatif dilakukan untuk menjawab hal-hal detail yang belum dijawab oleh studi kuantitatif serta memberikan gambaran yang dapat menjelaskan ataupun memberi persektif lain atas temuan kuantitatif. Studi kualitatif juga dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan program.

Salah satu bentuk studi kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang spesifik mengenai pelaksanaan suatu program atau kebijakan di suatu daerah tertentu dengan karakteristik tertentu. Studi kasus tidak hendak merepresentasikan sesuatu, namun memberi contoh tentang apa yang terjadi atas pelaksanaan suatu program di daerah tertentu. Studi kasus memberikan potret tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu program, apa masalah yang dihadapi, dan memberikan gambaran dalam perspektif pelaku kebijakan tentang suatu program.

Studi kasus dalam penelitian ini mengambil tempat di kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan program GGD. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dibantu dengan panduan wawancara, observasi lapang, serta melakukan perekaman

video. Informan dalam penelitian ini adalah tim dinas Pendidikan, kepala sekolah yang menerima GGD, guru GGD, guru non GGD dari sekolah yang mendapatkan GGD, siswa, dan masyarakat di sekitar sekolah.

## 3.2 Sumber Data

### 3.2.1 Data primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam informan di daerah studi kasus, yaitu kabupaten Sumba Timur. Data primer yang dikumpulkan terdiri dari data yang berhubungan dengan kebijakan dan pengelolaan GGD di tingkat kabupaten, peran dinas Pendidikan dalam seleksi, pengalokasian, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi program. Di tingkat sekolah, data yang dikumpulkan berupa pengalaman guru GGD dalam berhadapan dengan siswa, proses belajar mengajar, penyesuaian dengan lingkungan sekitar, dan dukungan pemerintah. Data juga didapat dari guru setempat untuk melihat perspektif mereka terhadap keberadaan guru GGD, pendapat peserta didik, kepala sekolah, dan masyarakat setempat dalam melihat keberadaan guru GGD. Data yang didapat kemudian dibuat catatan lapang, diklasifikasikan dalam tema-tema studi, diolah dan dianalisis.

### 3.2.2 Data sekunder dan Proses Konsolidasi dan Penggabungan Data

Terdapat beberapa data sekunder yang digunakan dalam kajian ini. Data tersebut bersumber dari data internal Kemendikbud, Data Bappenas terkait daerah 3T, dan beberapa data Badan Pusat Statistik yang terkait dengan karakteristik daerah untuk melakukan *matching*. Adapun penjelasan detail mengenai dataset yang digunakan dalam analisis ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3 Sumber Data Sekunder Analisis Kuantitatif GGD dan SGD**

Data	GGD	SGD
Dapodik tahun 2016 dan 2017, tingkat sekolah	X	
Hasil UN SMP tahun 2016 dan 2017	X	
Daftar Kabupaten yang termasuk dalam Daerah 3T tahun 2014	X	X
Data Rekapitulasi GGD yang lulus tahun 2017	X	
Susenas Maret 2017, KOR		X
Kondisi Ekonomi Wilayah Kabupaten (PDRB)		X
Data lokasi SGD untuk tingkat SMP		X
Data kode wilayah yang diterbitkan BPS tahun 2017	X	X

Sebelum melakukan evaluasi dampak dari program GGD dan SGD, terlebih dahulu diperlukan persiapan dalam mengolah data sekunder untuk masing-masing program karena data yang dipakai dan tahap-tahap yang diperlukan untuk menghasilkan data yang bisa dipakai dalam studi GGD dan SGD berbeda.

Studi evaluasi program GGD menggunakan data Dapodik tahun 2016 dan 2017, Hasil UN dan 2017, Daftar Kabupaten yang termasuk dalam Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdalam tahun 2014, serta data rekapitulasi GGD yang lulus tahun 2017. Sementara untuk studi program SGD, data yang dipakai adalah data Susenas KOR Maret tahun 2017, Data lokasi SGD untuk tingkat SMP, dan data Produk Domestik Bruto Regional tahun 2016.

Dalam proses konsolidasi dan penggabungan data GGD, tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi ID yang bisa menjadi penghubung masing-masing data;
2. Memastikan bahwa ID adalah unik untuk setiap observasi. Duplikasi terhadap ID dihapus;
3. Menggabungkan data Dapodik dan data UN dengan menggunakan NPSN sebagai penghubung (Data 1);
4. Data Dapodik dan UN yang digabung dibagi menurut jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA;
5. Melakukan pengecekan kesamaan nama daerah 3T dengan nama kabupaten/kota di data yang sudah digabung (Data 1);
6. Karena tidak tersedia kode unik untuk kabupaten/kota, maka nama daerah menjadi penghubung antara data daerah yang masuk 3T dengan data yang sudah digabung (Data 1);
7. Sebelum itu dipastikan bahwa kedua nama daerah konsisten diantara kedua data;
8. Dalam proses penggabungan data GGD tidak ditemukan ID yang unik, sehingga yang dipakai sebagai penghubung adalah nama sekolah;
9. Sebelum digabung, nama sekolah dipastikan konsisten antara data GGD dengan data yang sudah digabung (Data 1);
10. Setelah semuanya disatukan kemudian didapatkan (Data 2) yang digunakan untuk analisis dampak GGD.

Keterangan:

- Data 1 adalah hasil dari proses penggabungan antara data Dapodik tahun 2017 dan data UN 2017.
- Data 2 adalah hasil dari proses penggabungan antara data 1, data rekapitulasi GGD yang lulus tahun 2017, dan data Kabupaten yang masuk ke dalam daerah 3T tahun 2014.

Sementara dalam proses konsolidasi dan penggabungan data SGD, tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap ketersediaan kode wilayah di data Susenas KOR Maret 2017, data PDRB, dan data lokasi SGD;
2. Melakukan proses penggabungan kode wilayah yang diterbitkan oleh BPS tahun 2017 dengan data PDRB dan data lokasi SGD berdasarkan nama kabupaten;
3. Memastikan bahwa kode wilayah di masing-masing data yang dimaksud merupakan kode wilayah yang sama;
4. Melakukan perubahan terhadap kode wilayah kabupaten data Susenas agar sesuai dengan kode wilayah yang ada pada data PDRB dan lokasi SGD;

Menggabungkan data Susenas KOR Maret 2017 dengan data PDRB dan lokasi SGD dengan menggunakan kode wilayah kabupaten.



## 4. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

---

---





Hasil analisis terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) deskripsi program dan analisis data sekunder; (2) analisis dampak program GGD dan SGD terhadap beberapa indikator kunci pendidikan; dan (3) hasil studi kasus. Deskripsi program akan mencakup bagaimana program dilihat dari sudut pandang kebijakan publik dan beberapa analisis data sekunder. Evaluasi dampak dilakukan untuk melihat bagaimana GGD berdampak terhadap kualitas hasil belajar dan SGD terhadap tingkat partisipasi pendidikan. Pada studi kasus akan dibahas beberapa isu implementasi GGD di lapangan dan juga aspek-aspek lain seperti budaya dan sosial ekonomi guru GGD.

## **4.1 Desain Kebijakan Guru Garis Depan dan Sekolah Garis Depan**

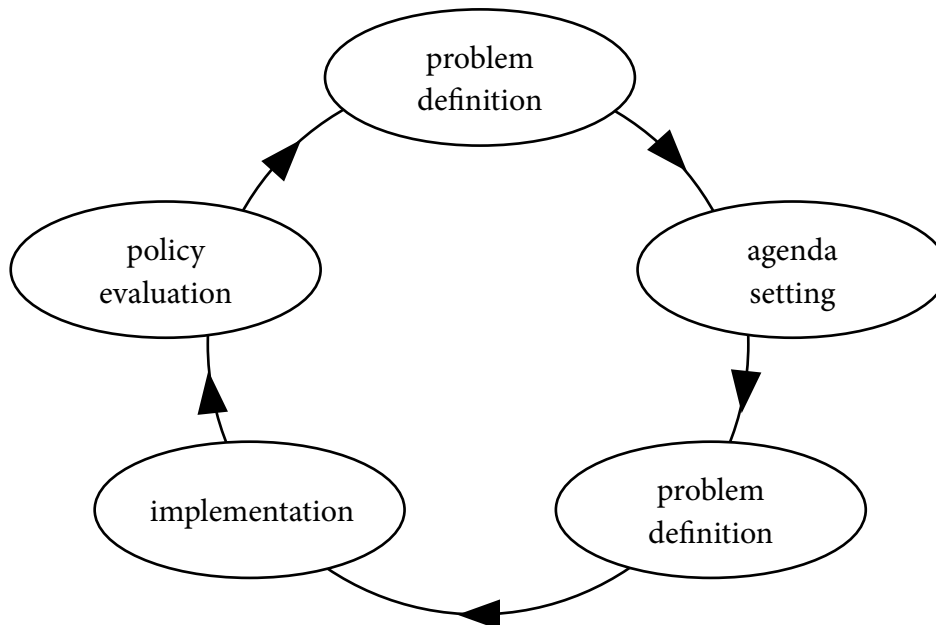
Siklus suatu kebijakan publik terdiri dari beberapa bagian. Bagian awal adalah mendefinisikan masalah yang hendak ditangani oleh kebijakan tersebut. Masalah ini dapat berupa masalah tunggal, atau beberapa masalah terkait, atau beberapa masalah dengan satu masalah yang menjadi masalah utama. Definisi masalah ini sangat penting karena akan menentukan kebijakan apa dan bagaimana yang akan diambil untuk menanganinya.

Proses tersebut berlanjut dengan *agenda setting*. Pada tahapan ini hal yang diidentifikasi adalah mengapa masalah tersebut perlu mendapat perhatian. Hal ini terkait baik dengan visi politik dari pimpinan suatu negara atau daerah, atau pula terkait dengan urgensi dari masalah tersebut dan pertimbangannya terkait dengan isu pembangunan nasional secara umum.

Pada tahapan selanjutnya kebijakan akan dikembangkan dan dipilih dari berbagai alternatif. Idealnya bentuk dari pengembangan kebijakan ini dalam bentuk kebijakan berbasis fakta (*evidence-based policy*) dimana sudah terdapat kajian yang komprehensif atas suatu masalah. Pada tahap ini, terdapat dua pendekatan yang biasanya akan dilakukan baik secara paralel ataupun berurutan, yaitu proses teknokratik dan partisipatoris. Pada proses teknokratis, proses pengembangan kebijakan akan dilakukan berdasarkan suatu kajian untuk menemukan fakta dan bukti atas masalah yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang diakui secara akademik. Sementara itu, proses partisipatoris dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mendapat masukan tentang kebijakan apa yang sebaiknya diambil.

Untuk menentukan efektivitas dan apakah suatu kebijakan akan berjalan, biasanya akan dilakukan percobaan atau piloting untuk mengimplementasikan kebijakan di daerah yang lebih kecil atau beberapa daerah percontohan sebelum dibawa menjadi kebijakan nasional atau lebih luas. Pada tahap selanjutnya evaluasi akan dilakukan baik dari sisi program, proyek, ataupun evaluasi dampak.

Gambar 1 Siklus Kebijakan Publik



(Mohsen, 2016)

Pada Tabel 4 ditunjukkan beberapa aspek dari Program GGD dan SGD yang dipetakan ke dalam kerangka siklus kebijakan publik. Pada tabel tersebut terlihat bahwa baik GGD atau SGD mengikuti definisi masalah yaitu terdapatnya ketidakmerataan.

Tabel 4 Matriks Kerangka Kebijakan Publik GGD dan SGD

Stage	GGD	SGD
<i>Problem definition</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan guru</li> <li>- Kekurangan guru berkualitas</li> <li>- Ketidakhadiran guru (teacher absenteeism)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan fasilitas sekolah</li> <li>- Kekurangan ruang kelas</li> <li>- Kekurangan sekolah</li> <li>- Terbatasnya akses Pendidikan di daerah terpencil</li> </ul>
<i>Agenda Setting</i>	Nawacita : Membangunan dari Pinggiran RPJMN : Pemerataan Kualitas Pendidikan	
<i>Policy development</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merekrut guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan di daerah 3T pada program Guru Garis Depan;</li> <li>- Memberikan insentif tambahan untuk guru tersebut;</li> <li>- Memberikan pelatihan tambahan pada guru yang akan ditempatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sekolah dan sarana-prasarana di daerah 3T yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan;</li> <li>- Kebijakan dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dari mekanisme transfer Dana Alokasi Khusus (DAK).</li> </ul>

## 4.1.1 Program Guru Garis Depan

**Tujuan.** Program Guru Garis Depan secara umum bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar yang berkualitas di daerah tertinggal. Tujuan tersebut juga tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yang masuk dalam Program Prioritas Penyediaan Tenaga Pendidik Yang Berkualitas Dan Penempatan Yang Merata – Guru.

**Aspek Kelembagaan.** Program Guru Garis Depan dari sisi administrasi terlembagakan dengan manajemen guru secara umum. Akan tetapi, dari sisi kebijakan dan penentuan formasi, kebijakan GGD merupakan diskresi dari Pemerintah Pusat. Perekrutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bertujuan agar tenaga pengajar yang direkrut merupakan guru-guru yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan asumsi bahwa jika perekrutan dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi, maka *talent pooling* dalam rekrutmen akan menjadi lebih luas cakupannya dan talenta terbaik dapat mengikuti dan memiliki kesempatan yang sama. Adapun secara administrasi guru sebagai PNS, maka GGD mengikuti pola PNS seperti biasanya yang mana proses dan manajemennya melibatkan baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Pemerintah Daerah.

Terdapat tiga pihak inti yang terlibat dalam program GGD. Kemendikbud berperan dalam merumuskan kebutuhan guru di masing-masing sekolah dan mengundang seluruh perwakilan daerah untuk meminta persetujuannya mengenai penempatan guru-guru GGD di masing-masing daerah. Kemendikbud juga berperan dalam menyelenggarakan pelatihan guru sebelum ditempatkan di masing-masing daerah. Kemenpan RB berperan dalam menyelenggarakan proses perekrutan guru CPNS secara terbuka dengan membuka formasi yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah berperan dalam melakukan negosiasi dengan Kemendikbud dalam penentuan formasi kebutuhan guru yang akan dibuka.

**Alokasi dan Distribusi Guru.** Proses distribusi guru-guru GGD di tingkat kabupaten sebelum proses perekrutan, terlebih dahulu akan melalui proses negosiasi dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan guru GGD setelah masa dua tahun penempatan akan menjadi tanggung jawab daerah dalam pengajiannya sehingga akan mempengaruhi belanja pegawai pemerintah daerah. Maka dari itu proses ini diperlukan agar ada kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah. Sementara proses distribusi pada tingkat sekolah masih perlu dikonfirmasi karena informasi yang didapat belum begitu jelas. Sumber di Dinas Pendidikan Sumba Timur menyebutkan bahwa semua alokasi GGD termasuk penempatan di sekolah merupakan keputusan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sumber lain mengatakan bahwa penunjukan sekolah adalah kewenangan pemerintah daerah.

**Koordinasi Pusat-Daerah.** Terdapat tiga aspek dalam koordinasi pusat-daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, dan implementasi. Dalam proses perencanaan, Kemdikbud menawarkan formasi, kemudian daerah menyetujui dengan pertimbangan tertentu. Program GGD utamanya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud. Anggaran tersebut meliputi gaji pokok yang akan dibebankan ke APBD melalui transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU, tunjangan khusus bagi guru GGD untuk 2 tahun pertama melalui mekanisme DAK, tunjangan sertifikasi, *pre-service training* atau pelatihan guru sampai proses penempatan dan pengiriman guru ke daerah semuanya di biayai oleh pemerintah pusat.

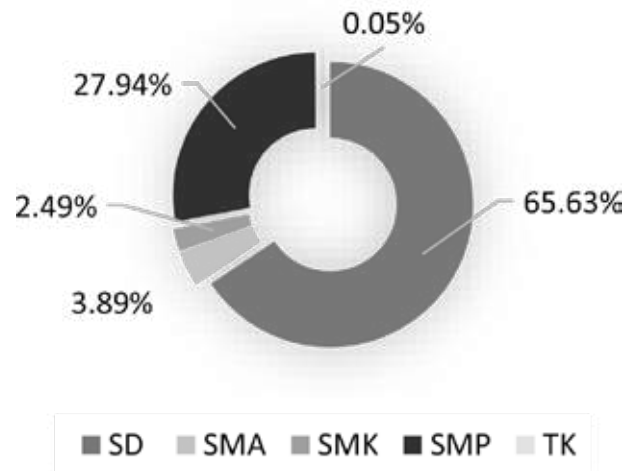
Manajemen guru GGD sebelum ditempatkan di daerah akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Setelah proses penempatan dan pengiriman guru ke daerah selesai, selanjutnya manajemen akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

**Value Proposition.** Perbedaan program GGD dengan program lain yang serupa adalah, dalam proses perekrutan guru GGD, kualitas pengajar akan lebih baik karena para calon tenaga pengajar melewati sekumpulan tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru GGD cukup ketat, syarat akademik harus memenuhi IPK minimal 3,00 dan harus memiliki sertifikat profesi. Guru GGD akan menerima tunjangan khusus sebagai kompensasi karena mereka mengajar di daerah tertinggal. Sebelum guru GGD ditempatkan di daerah, guru akan mengikuti proses pelatihan guru yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (PPG).

Dari sisi tunjangan, selama masa mengajar di daerah 3T, para guru akan mendapatkan tunjangan khusus. Tunjangan tersebut merupakan tambahan untuk gaji pokok dan tunjangan kinerja yang akan mereka terima. Tunjangan tersebut dalam konteks ekonomi dapat diartikan sebagai *premium* yang akan mereka terima ketika harus mengorbankan kesempatan bekerja lainnya di daerah perkotaan. Setidaknya ada tiga efek yang dapat timbul dari premium tersebut. Pertama, dengan adanya penambahan insentif tersebut juga diharapkan akan mampu menarik *talent pooling* yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam rekrutmen program. Kedua, tunjangan tambahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi guru ketika melakukan aktivitas mengajar di daerah 3T. Ketiga, tunjangan tersebut diharapkan mampu untuk menahan guru untuk tetap bekerja di daerah 3T.

Pada sisi *pre-service*, sebelum tenaga pengajar ditempatkan di sekolah di daerah tertinggal, mereka akan menerima pelatihan guru (PPG) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pelatihan tersebut diharapkan untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga ketika mereka sudah ditempatkan di masing-masing sekolah GGD akan membawa dampak dari sisi kualitas.

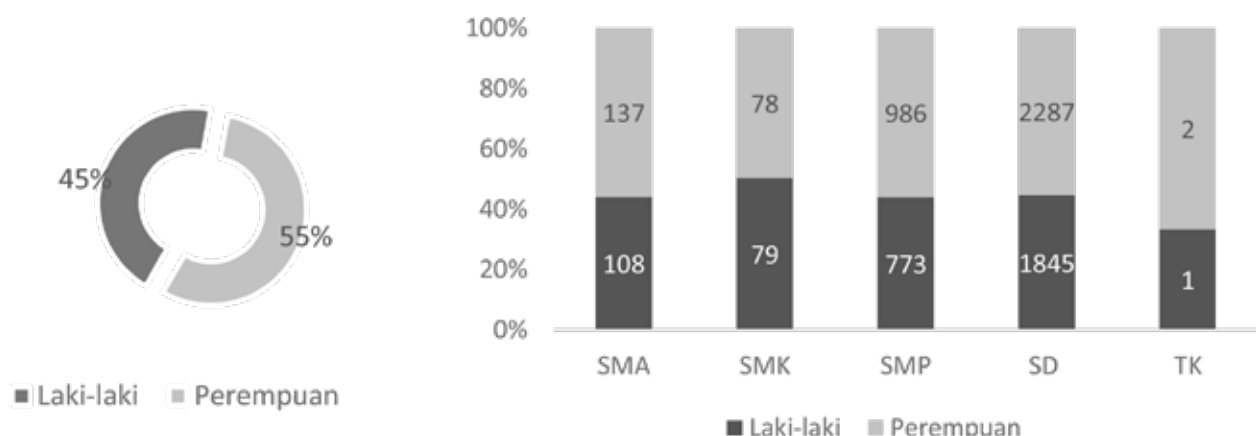
**Gambar 2 Guru Garis Depan Menurut Jenjang Pendidikan**



Sumber: Data Rekapitulasi GGD yang Lulus Tahun 2017

Berdasarkan jenjang Pendidikan, Program GGD didominasi oleh guru-guru SD dan SMP dimana lebih dari 90 persen terdapat di dua jenjang tersebut. Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa porsi guru GGD yang mengajar di sekolah SD ada sebanyak 65,63 persen, sementara yang mengajar di sekolah SMP ada sebanyak 27,94 persen. Sisanya, 3,89 persen mengajar di sekolah SMA, 2,49 persen mengajar di sekolah SMK, dan 0,05 persen mengajar di sekolah TK. Hal tersebut pada dasarnya normal karena porsi guru SD dan SMP terhadap total guru nasional juga besar. Selain itu, dari sisi kekurangan guru PNS di sekolah Negeri juga untuk jenjang tersebut cukup besar. Jumlah guru non PNS di SD dan SMP proporsinya paling banyak dibandingkan dengan jenjang lainnya. Sebanyak 13 persen guru di sekolah SD Negeri merupakan guru non PNS, sementara di SMP Negeri ada sekitar 11 persen.

**Gambar 3 Guru Garis Depan Menurut Gender**

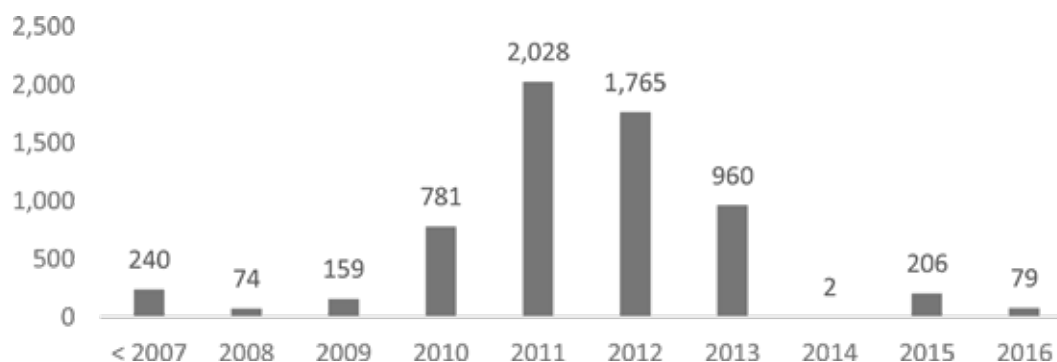


Sumber: Data Rekapitulasi GGD yang Lulus Tahun 2017

Jumlah guru GGD mayoritas merupakan perempuan. Dari total 6.296 guru GGD, 55 persen merupakan perempuan, sementara 45 persen lainnya merupakan guru laki-laki. Dari total guru di masing-masing jenjang, kecuali TK, sekolah yang memiliki guru yang hampir sama antara laki-

laki dan perempuan adalah SMK. Sementara sekolah-sekolah lain memiliki porsi yang hampir sama dengan persentase masing-masing guru menurut jenis kelamin secara keseluruhan. Jumlah guru GGD perempuan di SMA ada sebanyak 56 persen, sementara sisanya ada 44 persen dari total guru GGD yang memilih mengajar di Sekolah-sekolah SMA daerah 3T. Di SMK, persentase antara guru perempuan dan laki-laki hampir sama. Sementara di sekolah SMP, 56 persen merupakan perempuan, 44 persen laki-laki. Di SD 55 persen perempuan, sementara 45 persen adalah laki-laki.

Gambar 4 Tahun Lulus Guru Peserta GGD 2017



Sumber: Data Rekapitulasi GGD yang Lulus Tahun 2017

Komposisi guru GGD didominasi guru berusia muda. Sebagian besar guru yang berpartisipasi dalam program GGD merupakan lulusan antara tahun 2010-2013. Jika diasumsikan bahwa sebagian besar dari guru tersebut memulai pendidikan tinggi di usia 18-20 tahun dan menyelesaikan kuliah dalam waktu 4 sampai 5 tahun, maka guru-guru GGD akan banyak yang berusia di bawah 30 tahun.

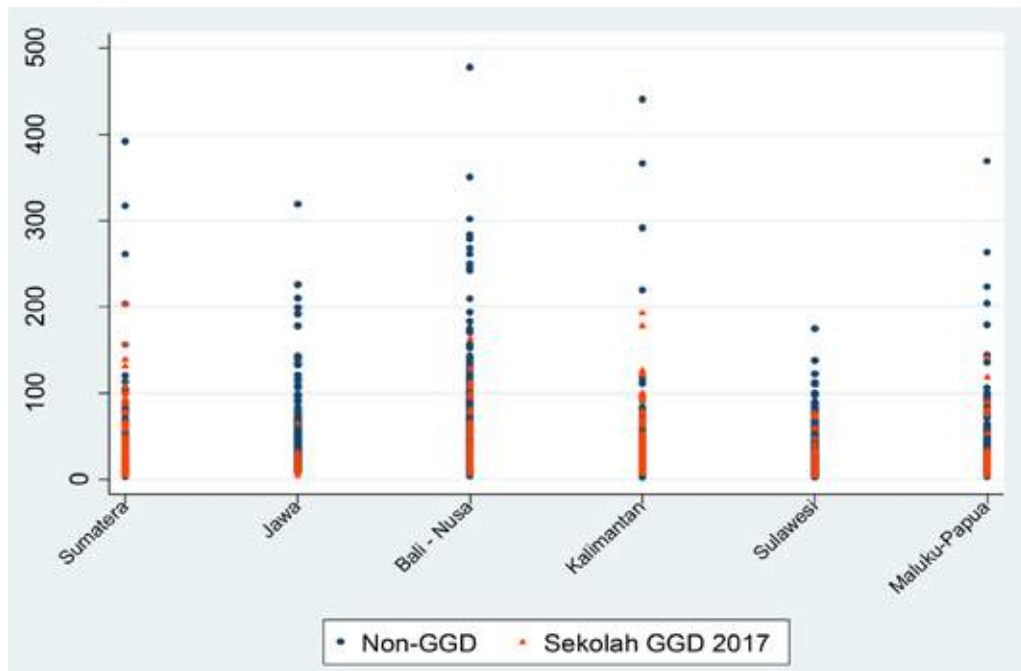
Komposisi guru yang berusia muda ini diharapkan mampu berdampak positif pada program GGD. Guru berusia muda memiliki fleksibilitas dalam hal mobilitas ke daerah yang dianggap terpencil dan terluar. Hal tersebut membuat perpindahan tempat tinggal bagi guru-guru tersebut tidak menjadi penghambat bagi program. Selain itu, guru yang berusia muda juga dianggap dapat memberi warna baru pada proses belajar mengajar di sekolah tujuan. Selain muda, dari selisih tahun lulus sekolah ke pendidikan tinggi, jika guru-guru tersebut telah bekerja sebagai guru sebelumnya, maka peserta GGD dianggap sebagian besar telah memiliki pengalaman mengajar sebelumnya sehingga lebih siap.

#### ***Apakah Program GGD sudah menysasar sekolah yang paling membutuhkan?***

Aspek penting dalam kebijakan yang diputuskan pada level Pemerintah Pusat adalah apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran. Tidak terkecuali pada kebijakan GGD, isu tersebut perlu ditelaah lebih lanjut dan dikaitkan dengan tujuan dari program GGD. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan termasuk di daerah 3T. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang paling membutuhkan GGD yang dalam hal ini adalah guru PNS adalah sekolah-sekolah yang memiliki kekurangan paling parah dalam hal guru PNS. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat posisi kecukupan guru PNS di

suatu sekolah adalah dengan menghitung rasio Guru PNS-Siswa. Semakin tinggi rasio siswa-guru PNS, yang artinya semakin banyak jumlah siswa yang ditangani oleh 1 guru PNS, maka semakin tinggi pula beban guru PNS tersebut dan mengindikasikan kekurangan guru PNS.

Gambar 5 Rasio Siswa-Guru PNS Tahun 2016 di Sekolah Program GGD 2017 dan Non-GGD



Sumber: Hasil Analisis Article 33 Indonesia, 2018

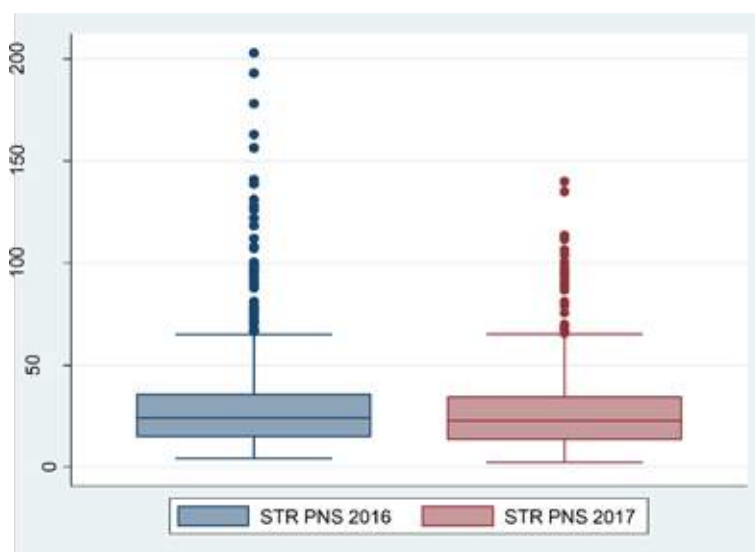
Dari hasil perbandingan rasio siswa-guru PNS tahun 2016 di sekolah yang di 2017 akan menerima guru GGD di Kabupaten yang sama, tampak sekolah yang mendapatkan GGD bukan yang paling membutuhkan guru PNS. Beberapa sekolah yang memiliki rasio siswa-guru PNS yang sangat tinggi memiliki rata-rata rasio guru pns-siswa di tahun 2016 untuk sekolah yang pada 2017 menerima guru GGD sekitar 28,3. Sementara, sekolah di Kabupaten yang sama dan tidak mendapatkan GGD di tahun 2017, rasio siswa-guru pns rata-ratanya sekitar 41. Oleh karena itu, terdapat indikasi bukan sekolah yang paling membutuhkan guru PNS yang mendapatkan alokasi GGD, bahkan di dalam satu Kabupaten yang pemerintah daerahnya sudah menyetujui untuk berpartisipasi dalam GGD. Dalam gambar di atas, titik biru adalah sekolah yang tidak mendapatkan program GGD dan titik merah adalah sekolah yang mendapatkan program GGD. Terlihat bahwa sebagian sekolah yang berwarna biru berada di atas yang artinya rasio siswa-guru PNS tinggi dan berarti kekurangan guru PNS, namun tidak mendapatkan guru GGD. Sementara, sekolah dengan titik merah yang berarti mendapatkan GGD berada dibawah, dimana mereka adalah sekolah yang relative tidak kekurangan guru PNS.

Temuan di atas terjadi karena sangat mungkin rencana penempatan guru program GGD tidak mempertimbangkan sekolah yang paling membutuhkan, namun sekolah yang memenuhi kriteria penerima GGD, meski bukan yang paling kekurangan guru. Proses perencanaan penempatan tidak dilakukan dengan sistem yang menjamin adanya prioritas bagi sekolah yang paling membutuhkan guru di suatu wilayah. Kemungkinan lain adalah adanya faktor keterbatasan jumlah siswa di wilayah

3T. Diketahui bahwa sekolah di wilayah yang terpencil pada umumnya mempunyai keterbatasan jumlah siswa karena jumlah anak usia sekolah yang dapat menjangkau fasilitas sekolah tersebut memang sedikit. Hal ini berkontribusi pada rendahnya rasio siswa-guru PNS yang dapat dianggap relatif tidak kekurangan guru. Apapun alasan atas ketidaktepatan sasaran seperti yang digambarkan pada temuan di atas, dalam perencanaan penempatan GGD baik dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah membutuhkan mekanisme yang akuntabel yang memastikan bahwa GGD tepat pada sekolah yang paling membutuhkan.

Seperti diketahui, program GGD bertujuan untuk meningkatkan kecukupan guru di sekolah-sekolah daerah 3T. Sisi positif dari Program GGD adalah bahwa di sekolah-sekolah yang dialokasikan GGD, rasio siswa-guru PNS menurun. Program GGD berhasil memenuhi kecukupan guru di sekolah-sekolah di wilayah 3T. Dari Gambar 6 terlihat bahwa sebelum program GGD masuk tahun 2016, rata-rata rasio siswa-guru PNS lebih tinggi dibandingkan dengan setelah program GGD masuk tahun 2017.

Gambar 6 Perbandingan Rasio Siswa-Guru PNS di Sekolah GGD (Sekolah yang Mendapat Program GGD 2017)



Sumber: Hasil Analisis Article 33 Indonesia

## 4.1.2 Program Sekolah Garis Depan (SGD)

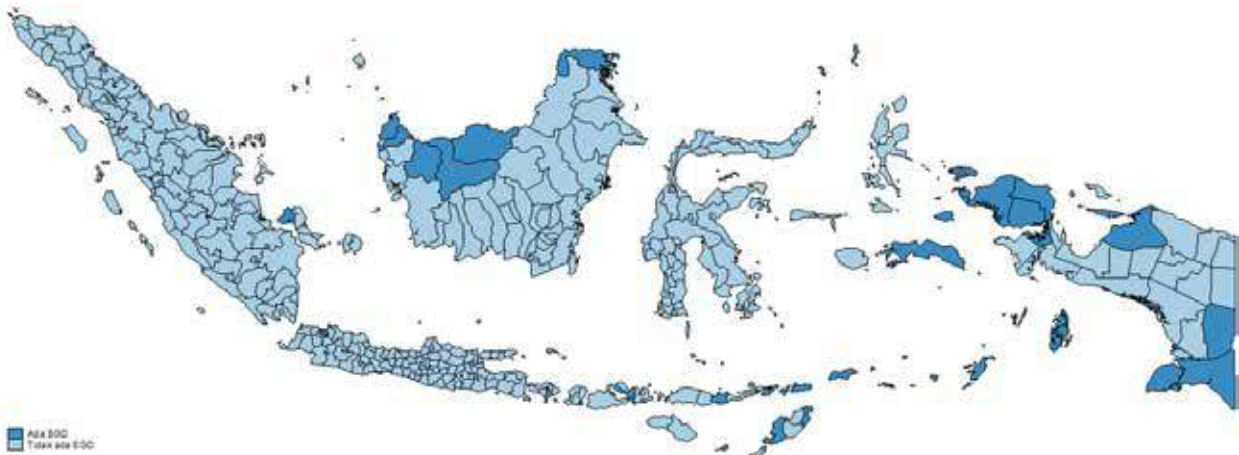
**Tujuan.** Program Sekolah Garis Depan (SGD) bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan yang berfokus pada peningkatan akses pada pelayanan Pendidikan di daerah terpencil. Peningkatan akses dan pelayanan Pendidikan dilakukan melalui pembangunan unit sekolah baru, revitalisasi sekolah baru, termasuk bantuan sarana prasarana sekolah lainnya.

**Aspek Kelembagaan dan Koordinasi Pusat-Daerah.** Program SGD secara administrasi terinstitusionalisasi dalam hal anggaran. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana dekosentrasi kepada pemerintah daerah yang kemudian dipakai oleh pemerintah daerah sesuai dengan target dari pengalokasian dana tersebut.

**Alokasi dan Distribusi.** Anggaran untuk program SGD dilakukan dengan mekanisme dekonsentrasi yang dananya berasal dari pemerintah pusat. Setelah dana tersebut diterima oleh pemerintah daerah dan berubah menjadi sekolah, revitalisasi sekolah, atau fasilitas sekolah, kepemilikan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Biaya operasi untuk pemeliharaan berasal dari anggaran pemerintah daerah.

**Value Proposition.** Perbedaan program SGD dengan program lain yang sejenis adalah program ini secara khusus menargetkan sekolah-sekolah yang memang membutuhkan (*well targeted*). Penganggaran dilakukan dengan mekanisme dekonsentrasi, sehingga peran pemerintah pusat lebih kuat dalam proses penyelenggaraan dibanding pemerintah daerah.

**Gambar 7 Sebarang Sekolah Penerima Program SGD**



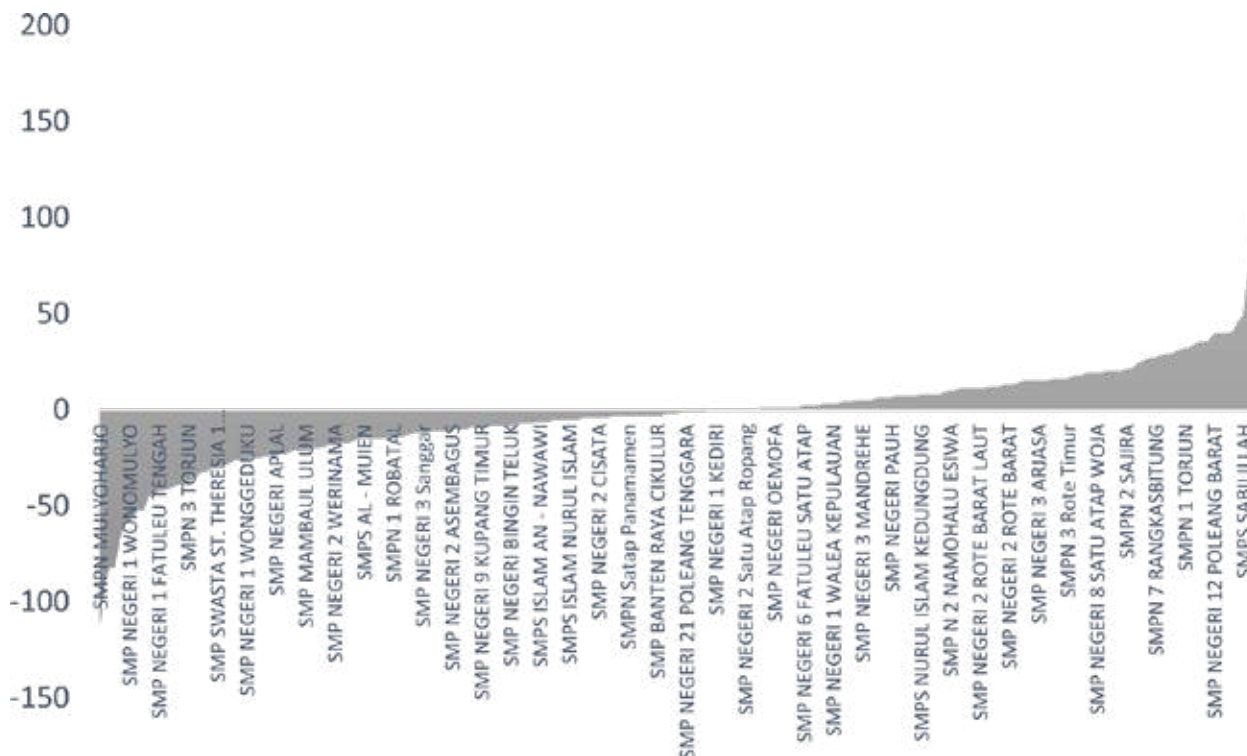
Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

Keterangan: Pada tahun 2016, telah dibangun 114 SGD yang tersebar di 49 kabupaten/ kota.

Sekolah yang mendapatkan program SGD terutama dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru atau revitalisasi ruang kelas yang rusak diharapkan akan dapat menampung siswa yang lebih besar. Dari data yang terlihat pada Gambar 8 berikut, terlihat bahwa hanya sedikit sekolah yang penambahannya signifikan, kurang dari setengah atau sekitar 30%. Sebagian besar sekolah bahkan siswanya berkurang. Belum dapat disimpulkan bahwa SGD kurang berhasil dalam meningkatkan partisipasi sekolah karena pengurangan mungkin saja disebabkan karena perpindahan atau jumlah penduduk usia sekolah di daerah tersebut memang lebih sedikit.

Hasil tersebut terutama karena program SGD masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah sekolah di wilayah 3T yang menjadi area sasaran, yaitu hanya 114 program. Dari jumlah tersebut sebagian besar berupa revitalisasi ruang kelas yang dampaknya terhadap penambahan siswa cenderung kurang signifikan. Sementara hanya sangat sedikit sekali program ini berupa penambahan ruang kelas baru atau sekolah baru, yang sebenarnya diharapkan akan menambah partisipasi sekolah.

Gambar 8 Perubahan Jumlah Siswa SMP Tahun 2016-2017 Penerima Program SGD 2017



Sumber: Data Rehab RPL 3T, PKB 3T, dan USB 3T tahun 2017

## 4.2 Model Empiris Evaluasi Dampak SGD dan GGD

Analisis regresi dengan metode PSM digunakan untuk melihat dampak baik program GGD dan SGD. Pada model GGD, metode PSM dikombinasikan dengan *regresi linier* untuk melihat dampak GGD terhadap perkembangan nilai ujian nasional (UN). Adapun untuk SGD, metode PSM akan dikombinasikan dengan Logit dan Probit untuk melihat bagaimana dampak SGD terhadap probabilitas anak untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi jika di daerah tempat dia tinggal ada program SGD.

### 4.2.1 Evaluasi Dampak GGD

Secara umum, program GGD belum mampu meningkatkan rata-rata nilai UN siswa SMP. Pengaruh program GGD belum signifikan terhadap hasil belajar anak SMP, khususnya untuk meningkatkan rata-rata nilai UN sekolah yang mendapatkan GGD. Akan tetapi, program GGD berdampak pada hal lain, yaitu ketimpangan pencapaian hasil belajar yang diukur dengan nilai UN intra-sekolah.

Tabel 5 Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN), SMP

	Mean B. Indo	Mean B. Ing	Mean MTK	Mean IPA	Mean Total
GGD	-0.290 (0.526)	0.548 (0.780)	0.712 (0.948)	0.300 (0.720)	1.270 -2.619
Rasio Guru-siswa	-0.090* (0.039)	0.042 (0.057)	0.065 (0.070)	0.023 (0.053)	0.040 (0.193)
School Size	0.004 (0.002)	-0.007* (0.003)	-0.011** (0.004)	-0.004 (0.003)	-0.019 (0.011)
% Ruang kelas baik	1.280 (0.747)	-0.131 -1.108	-0.003 -1.348	0.048 -1.023	1.195 -3.722
Constant	59.418*** (0.601)	51.025*** (0.892)	51.610*** -1.084	50.124*** (0.823)	212.178*** -2.994
R-squared	0.004	0.002	0.004	-0.002	-0.000
N	1304	1304	1304	1304	1304

\* p<0.05, \*\* p<0.01, \*\*\* p<0.001

Analisis dampak terhadap nilai UN juga dilakukan untuk melihat ketimpangan nilai UN di dalam sekolah antara sekolah GGD dan Non-GGD. Ketimpangan tersebut diukur dengan standar deviasi nilai UN di dalam satu sekolah. Hal ini penting untuk dilakukan karena ukuran rata-rata terkadang menggambarkan kenaikan nilai hanya pada beberapa siswa. Misalnya, GGD berpengaruh terhadap rata-rata nilai UN siswa, namun nilai UN siswa yang naik hanya nilai mereka yang berada di kuintil teratas. Naiknya nilai siswa di kuintil atas tersebut, dengan asumsi nilai yang lain tidak berubah, akan meningkatkan rata-rata, sehingga seolah-olah terjadi perbaikan secara umum.

Tabel 6 Hasil Regresi: Ketimpangan Nilai UN Intra-Sekolah, SMP

	Std B. Indo	Std B. Ing	Std MTK	Std IPA	Std Total
GGD	-0.600*** (0.160)	-0.511*** (0.135)	-0.373* (0.163)	-0.132 (0.135)	-1.532*** (0.387)
Rasio Guru-siswa	-0.034** (0.012)	-0.019 (0.010)	-0.022 (0.012)	-0.030** (0.010)	-0.121*** (0.028)
School Size	0.007*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.005*** (0.001)	0.006*** (0.001)	0.022*** (0.002)
% Ruang kelas baik	-0.030 (0.228)	0.023 (0.192)	-0.194 (0.232)	-0.286 (0.192)	-0.251 (0.550)
Constant	9.181*** (0.183)	7.095*** (0.155)	7.484*** (0.187)	7.104*** (0.154)	18.685*** (0.442)
R-squared	0.080	0.047	0.051	0.088	0.144
N	1304	1304	1304	1304	1304

\* p<0.05, \*\* p<0.01, \*\*\* p<0.001

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa meskipun program GGD belum signifikan meningkatkan rata-rata nilai UN, program GGD mampu menurunkan ketimpangan nilai UN antara murid di satu sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kehadiran guru GGD mampu menurunkan ketimpangan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Selain itu, secara nilai UN total program GGD juga mampu menurunkan ketimpangan nilai UN siswa di sekolah tersebut. Hal tersebut artinya bahwa kehadiran guru GGD membantu siswa-siswa di kuintil bawah untuk memperoleh nilai yang lebih baik. Hasil yang mirip diperoleh untuk pelajaran lainnya, kecuali IPA.

Sementara itu, untuk pelajaran IPA diperoleh hasil bahwa guru GGD belum mampu meningkatkan baik secara rata-rata dan juga belum mampu menurunkan ketimpangan nilai UN IPA. Hasil ini diduga karena untuk IPA, guru GGD belum mampu mengimplementasikan dengan baik keterampilan dan pengetahuan guru untuk pelajaran IPA yang dibawa ke sekolah tujuan.

Adapun untuk nilai UN secara total, program GGD berdampak pada penurunan ketimpangan nilai UN. Meskipun rata-rata nilai UN total belum signifikan, kehadiran guru GGD di sekolah menurunkan ketimpangan nilai UN antar murid di satu sekolah.

Dapat diduga bahwa pelaksanaan Program GGD memiliki konsekuensi menurunkan tingkat ketimpangan hasil belajar siswa di sekolah-sekolah 3T. Akan tetapi, dampaknya tidak seragam untuk semua subyek pelajaran. Beberapa subyek pelajaran tertentu memiliki dampak yang lebih besar, misalnya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Diduga bahwa kedua subyek tersebut lebih mudah untuk diajarkan dengan media dan alat bantu yang minim, berbeda dengan pelajaran IPA yang membutuhkan alat bantu. Hasil temuan lapangan di Sumba Timur dapat menjadi gambaran mengapa hal ini terjadi bahwa inisiatif guru GGD untuk proses belajar-mengajar kadang terhambat dengan kurangnya dukungan untuk media dan alat bantu.

## **4.2.2 Evaluasi Dampak SGD**

Analisis Logit dan Probit dilakukan untuk melihat dampak program SGD terhadap probabilitas siswa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Analisis dilakukan di level siswa yang merupakan sampel di Susenas 2017. Siswa yang pada tahun sebelumnya berada di jenjang pendidikan SD (SMP) yang tinggal di daerah SGD dibandingkan dengan yang tidak tinggal di daerah SGD dan dilakukan *matching* dengan metode PSM.

Tabel 7 Hasil Regresi (SGD): Probabilitas Melanjutkan ke SMP

	Regresi1	Probit 1	Logit 1	Regresi 2	Probit 2	Logit 2
SGD	-0.004 (0.005)	-0.044 (0.052)	-0.100 (0.116)	-0.005 (0.005)	-0.052 (0.058)	-0.116 (0.128)
Pekerja formal	0.013* (0.006)	0.142* (0.064)	0.328* (0.141)	0.013* (0.006)	0.141* (0.064)	0.328* (0.141)
Pendidikan Krt	-0.014*** (0.002)	-0.176*** (0.030)	-0.391*** (0.069)	-0.014*** (0.002)	-0.176*** (0.030)	-0.391*** (0.069)
Usia	-0.000 (0.000)	-0.005 (0.003)	-0.011 (0.007)	-0.000 (0.000)	-0.005 (0.003)	-0.011 (0.007)
Perkotaan	-0.009 (0.006)	-0.125 (0.070)	-0.284 (0.161)	-0.011 (0.008)	-0.147 (0.098)	-0.330 (0.226)
Aset	0.000 (0.003)	0.008 (0.034)	0.019 (0.081)	0.000 (0.003)	0.007 (0.034)	0.018 (0.081)
Exp_cap	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
SGD*Perkotaan				0.004 (0.011)	0.045 (0.133)	0.090 (0.306)
Constant	0.094*** (0.020)	-1.153*** (0.249)	-1.860*** (0.562)	0.094*** (0.020)	-1.148*** (0.250)	-1.852** (0.563)
R-squared	0.006			0.006		
N	7632	7632	7632	7632	7632	7632

\*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.001$

Hasil analisis menunjukkan bahwa program SGD diduga belum mampu meningkatkan probabilitas anak untuk melanjutkan dari jenjang SD ke SMP, demikian juga untuk melanjutkan dari SMP ke SMA. Hasil regresi dari berbagai metode menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing metode estimasi. Meskipun secara tanda sudah sesuai dengan yang diharapkan (*expected sign* negatif). Kemungkinan yang diduga adalah jumlah sekolah SGD masih terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan sekolah.

Tabel 8 Hasil Regresi (SGD): Probabilitas Melanjutkan ke SMA

	Regresi1	Probit 1	Logit 1	Regresi 2	Probit 2	Logit 2
SGD	0.000 (0.006)	0.001 (0.070)	0.006 (0.156)	0.000 (0.007)	0.002 (0.083)	0.009 (0.185)
Pekerja formal	-0.007 (0.007)	-0.088 (0.087)	-0.209 (0.196)	-0.007 (0.007)	-0.088 (0.087)	-0.209 (0.196)
Pendidikan Krt	-0.004 (0.003)	-0.046 (0.039)	-0.102 (0.087)	-0.004 (0.003)	-0.046 (0.039)	-0.102 (0.087)
Usia	0.000 (0.000)	0.002 (0.004)	0.005 (0.009)	0.000 (0.000)	0.002 (0.004)	0.005 (0.009)
Perkotaan	-0.000 (0.007)	-0.005 (0.081)	-0.005 (0.183)	-0.000 (0.009)	-0.003 (0.113)	0.000 (0.255)
Aset	-0.004 (0.003)	-0.052 (0.034)	-0.114 (0.075)	-0.004 (0.003)	-0.052 (0.034)	-0.114 (0.075)
Exp_cap	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
SGD*Perkotaan				-0.001 (0.013)	-0.004 (0.153)	-0.010 (0.346)
Constant	0.067** (0.025)	-1.407*** (0.293)	-2.435*** (0.648)	0.067** (0.026)	-1.408*** (0.295)	-2.437*** (0.651)
R-squared	0.001			0.000		

\*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.001$

## 4.3 Studi Kasus: Kabupaten Sumba Timur

### 4.3.1 Pra Penempatan GGD

Pemerintah Daerah tidak memiliki diskresi dalam rekrutmen GGD. Mesti GGD merupakan CPNS daerah, namun penetapan formasi GGD, pelaksanaan seleksi, hingga pengiriman GGD ke daerah penempatan seluruhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat. Secara prosedural Kemendikbud menginformasikan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana pembukaan formasi GGD dan meminta Pemerintah Daerah untuk pengajuan formasi GGD. Akan tetapi berdasarkan keterangan responden di Kemendikbud, sebelum Pemerintah Daerah diminta menyampaikan usulan formasi GGD, Kemendikbud sudah menyusun rancangan formasi GGD berdasarkan analisis kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T. Basis data yang digunakan Kemendikbud adalah data pokok pendidikan (DAPODIK) sekolah-sekolah yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Rancangan formasi GGD inilah yang selanjutnya disepakati bersama antara Kemendikbud dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diajukan kepada Kemenpan RB.

Keterangan bahwa Kemendikbud yang menentukan formasi GGD dibenarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Menurut responden di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, pihaknya mengajukan usulan formasi GGD penerimaan tahun 2016 sebanyak 300 orang. Akan tetapi formasi GGD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berjumlah 140, dan tidak semua formasi tersebut sama dengan yang diusulkan. Ke-140 formasi tersebut terdiri atas:

1. Tingkat TK/PAUD: 1 orang
2. Tingkat SD: 85 guru kelas dan ; 23 guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan
3. Tingkat SMP: 9 guru pendidikan jasmani olahraga dan kreasi; 5 guru IPA; 6 guru matematika; 5 guru bahasa Inggris dan; 4 guru bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pengajuan formasi GGD oleh Pemerintah Sumba Timur sepertinya lebih bersifat formalitas untuk memenuhi prosedur penerimaan CPNS daerah.

Ujian seleksi GGD penerimaan tahun 2016 dilaksanakan di tempat yang mendekati wilayah sebaran GGD. Hal ini berbeda dengan ujian seleksi GGD tahun 2015 yang diselenggarakan terpusat di Jakarta. Mendekatkan tempat ujian seleksi dengan daerah sebaran GGD dapat memberi kesempatan lebih luas kepada putra-putri daerah, tempat formasi GGD berada, untuk mengikuti ujian seleksi. Bagi daerah-daerah di wilayah NTT dan sekitarnya, ujian seleksi GGD diselenggarakan di kota Kupang.

Tidak semua Pemerintah Daerah menerima tawaran formasi GGD dari Kemendikbud. Beberapa daerah menolak tawaran formasi GGD dengan berbagai alasan. Sedangkan beberapa daerah lagi justru meminta formasi GGD, namun ditolak oleh Pemerintah Pusat karena alasan kemampuan fiskal daerah tersebut.

Tidak adanya ruang diskresi bagi Pemerintah Daerah dalam rekrutmen GGD dan tidak adanya prioritas bagi putra dan putri daerah dalam seleksi GGD, membuat beberapa daerah menolak formasi GGD. Pada umumnya mereka beralasan bahwa GGD merupakan CPNS daerah yang pengajiannya menjadi tanggung jawab daerah. Sementara itu GGD yang diterima daerah tidak serta merta menjadi faktor penambah alokasi DAU sehingga akan memberatkan keuangan daerah. Alasan lainnya, karena GGD merupakan CPNS daerah maka sudah selayaknya putra dan putri daerah mendapatkan prioritas untuk menjadi CPNS GGD. Pertimbangan lain, di wilayah 3T ada banyak guru honorer yang mengabdikan cukup lama yang selama ini tidak mendapat imbalan atas pengabdianannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah menganggap yang paling berhak atas formasi GGD adalah guru-guru honor yang sudah lama mengajar di wilayah 3T.

Sebaliknya, menurut informasi dari responden Kemendikbud, ada juga beberapa daerah yang meminta formasi GGD kepada Pemerintah Pusat karena kekurangan guru di sekolah-sekolah di wilayah 3T. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan karena APBD mereka dinilai tidak akan cukup untuk membayar tambahan gaji PNS GGD.

Rekrutmen GGD yang dilakukan terpusat (sentralistik) memiliki keunggulan karena dapat menjaring GGD yang berkompeteren dari berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan jika rekrutment GGD diserahkan kepada daerah (desentralisasi), kemungkinan Pemerintah Daerah akan memprioritaskan putra-putri daerah dengan mengesampingkan aspek kompetensi mengajar. Putra-putri daerah dianggap lebih siap ditempatkan di wilayah 3T karena sudah terbiasa dengan kondisi wilayah 3T dan memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat setempat.

Pada rekrutmen GGD 2, Kemendikbud mensyaratkan pelamar memiliki minimal IPK 3,00 dan sertifikasi profesi. Persyaratan tersebut secara otomatis menghalangi pelamar yang tidak kompeten dan menjadi langkah awal untuk menjaring calon GGD yang memiliki kompetensi mengajar. Dinas Pendidikan kabupaten Sumba Timur mengakui bahwa adanya ketentuan minimal IPK 3.00 dan sertifikasi profesi tersebut menjadi penghalang bagi putra-putri Sumba Timur untuk mendaftar seleksi CPNS GGD. Padahal mereka pada umumnya guru-guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah-sekolah di wilayah 3T. Menurut pihak Dinas pendidikan, sebagian besar pelamar GGD dari Kabupaten Sumba Timur adalah lulusan universitas terbuka (UT) dengan IPK rata-rata hanya sedikit di atas 2. Selain itu, hanya beberapa saja pelamar GGD yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur yang memiliki sertifikasi profesi, karena baik UT maupun universitas lain di Sumba Timur belum ada yang menyelenggarakan PPG.

Oleh karena itu, menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur seharusnya pengalaman lama mengajar menjadi syarat yang bisa menggantikan IPK dan sertifikasi guru, karena dianggap sebagai tahap awal untuk mengukur kompetensi mengajar. Adapun penentuan kelulusan ditentukan melalui test tertulis. Pihak dinas pendidikan mengaku, walau Putra-putri sumba timur pada umumnya tidak memiliki IPK tinggi namun sebagian mereka telah lulus seleksi sebagai fasilitator proyek Inovasi. Proyek Inovasi merupakan program peningkatan kompetensi guru dalam hal mengajar membaca dan menulis di kelas awal kerja sama antara program Inovasi - USAID bersama Kemendikbud.

Meskipun tidak masuk dalam persyaratan penerimaan GGD tahun 2016, namun secara implisit Pemerintah Pusat mengakui bahwa pengalaman mengajar di wilayah 3T merupakan faktor penting bagi keberhasilan GGD. Kenyataan tersebut dijumpai di Kabupaten Sumba Timur, dimana pada penerimaan GGD tahun 2016, Kemendikbud memberikan prioritas kepada alumni SM3T untuk diterima sebagai GGD. Perlakuan khusus terhadap alumni SM3T diketahui dengan diterimanya seluruh alumni SM3T sarjana PAUD yang berjumlah 34 orang. Padahal mereka melamar hanya untuk 1 formasi GGD guru TK/PAUD. Alumni SM3T sarjana PAUD dengan nilai hasil ujian GGD tertinggi ditempatkan di TK/PAUD, dan selebihnya ditempatkan sebagai guru SD kelas bawah.

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, GGD yang berasal dari jalur SM3T lebih siap dibandingkan dengan GGD lainnya. Hal ini terlihat dari GGD penerimaan tahun 2015 (GGD ke-1), yang keseluruhannya merupakan alumni SM3T, dinilai lebih berhasil dibandingkan dengan GGD penerimaan tahun 2016. Dinas Pendidikan mengaku tidak pernah mendapatkan laporan masalah baik terkait kehadiran GGD di kelas maupun interaksi lingkungan masyarakat. Berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan, GGD ke-1 cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah penempatan, bahkan beberapa dari mereka terlibat aktif kegiatan kemasyarakatan seperti mengikuti upaya kematian upacara adat.

Ketidaksesuaian antara formasi yang dipilih oleh pelamar GGD dengan formasi yang diperoleh berpotensi menimbulkan masalah setelah dua tahun pertama penempatan. GGD yang ditempatkan pada formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya akan menyebabkan GGD akan kehilangan tunjangan profesi karena tidak memenuhi syarat linearitas. Sementara itu, jika Pemda menempatkan posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan GGD, belum tentu itu berada di wilayah 3T sehingga GGD akan kehilangan tunjangan khusus. Di Kabupaten Sumba Timur, ada 34 GGD dari jalur SM3T PPG PAUD yang ditempatkan di SD yang mengampu kelas bawah. Ada juga GGD sarjana pendidikan matematika dan sarjana pendidikan lain yang ditempatkan di SD. Selain tidak linear, hal tersebut menyulitkan GGD dalam mengajar karena mereka harus memahami kurikulum pendidikan SD.

Sementara untuk GGD ke-2, dinas pendidikan mengaku sering mendapat laporan mengenai masalah kehadiran GGD di kelas dan masalah lain. Bahkan 3 orang GGD ke-2 mengundurkan diri karena merasa tidak sanggup berada di sekolah penempatan.

### **4.3.2 GGD di Sekolah Penempatan**

GGD yang mengajar kelas bawah harus dapat menerjemahkan materi pelajaran ke dalam bahasa ibu agar dapat difahami oleh siswa. Di Kabupaten Sumba Timur, siswa-siswa kelas bawah di sekolah penempatan GGD pada umumnya belum mengerti bahasa Indonesia. Bahasa pengantar yang biasa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas adalah bahasa ibu. Untuk itu, GGD yang mengajar di kelas bawah dituntut untuk bisa berbahasa ibu, atau paling tidak mengerti bahasa ibu yang dipakai oleh siswa. Menurut pengakuan GGD yang ditempatkan di kecamatan Wela Tidahu, mereka berusaha melafalkan materi-materi yang disampaikan di dalam kelas dengan bahasa ibu. Untungnya, materi pelajaran di kelas bawah baru sebatas pelajaran membaca dan menulis, sehingga tidak terlalu sulit melafalkan huruf dan angka menggunakan bahasa ibu dan

bahasa Indonesia. Mesti demikian, GGD tetap berusaha membiasakan siswanya untuk belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, termasuk menyarankan kepada orang tua siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia saat berada di rumah.

GGD yang mengajar di kelas atas, terkadang juga harus mengajarkan membaca dan berhitung karena banyak siswa di kelas atas yang belum lancar membaca dan berhitung. Untuk mengatasi kondisi tersebut, GGD lebih menekankan pelajaran membaca dan berhitung daripada menggunakan buku pelajaran kurikulum 2013 sesuai levelnya. Bahkan sering kali GGD menggunakan buku kurikulum KTSP kelas bawah untuk mengajarkan membaca dan menulis siswa kelas atas.

Siswa di sekolah penempatan GGD pada umumnya tidak bisa membayangkan materi dalam buku pelajaran karena mereka belum pernah keluar dari daerah tempat tinggalnya. Sebagai contoh, siswa kelas empat tidak punya gambaran mengenai jenis-jenis alat transportasi seperti bis, kereta api, pesawat terbang dan lain-lain karena mereka belum pernah melihat sebelumnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, GGD biasa menggunakan alat bantu mengajar berupa foto, gambar dan video yang diambil dari internet dan menampilkannya dengan laptop. Akan tetapi daya baterai laptop bisa bertahan hanya untuk beberapa jam saja sehingga pemakaiannya dibatasi agar bisa digunakan pada kelas-kelas lain pada hari-hari berikutnya. Pengisian daya baterai laptop, biasanya dilakukan pada akhir pekan (hari Sabtu dan Minggu) di kota kecamatan terdekat yang sudah ada jaringan listrik dengan jarak sekitar 35 km dari sekolah penempatan.

Salah satu cara GGD membantu siswa kelas bawah agar lebih cepat belajar membaca dan berhitung dengan cara menghias ruang belajar dengan berbagai tempelan huruf dan angka berwarna-warni. Tempelan huruf dan angka berwarna-warni dan melafalkannya dalam bahasa ibu, membuat siswa lebih mudah mengingat huruf dan angka. Cara ini juga menjadikan KBM lebih interaktif karena siswa harus menunjukan satu persatu huruf-huruf yang ada di dinding kelas dari setiap kata atau kalimat yang disampaikan oleh sang guru. Cara lain yang digunakan oleh GGD untuk membantu belajar membaca dan berhitung adalah dengan menggunakan buku ukuran besar (*big book*). *Big book* merupakan buku seukuran kuarto yang setiap lembar buku berisi satu buah gambar dengan keterangan nama di bawahnya. Siswa diminta melafalkan nama gambar tersebut dengan mengeja huruf yang ada di bawahnya. Menurut salah satu GGD, metode KBM dengan menggunakan *big book* ia peroleh saat mengikuti kelompok kerja guru.

GGD juga memberikan penghargaan kepada siswa yang mau menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan. Penghargaan sederhana berupa permen cukup memotivasi siswa untuk berlomba menjawab pertanyaan atau memecahkan soal yang diberikan oleh sang guru.

Untuk menyediakan alat peraga pendukung belajar dan penghargaan seperti di atas, seringkali GGD harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Menurut pengakuan salah seorang GGD, ia beberapa kali menyampaikan kepada kepala sekolah mengenai perlunya alat peraga untuk membantu proses KBM di kelas. Akan tetapi kepala sekolah tidak juga mengeluarkan dana untuk membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat bantu mengajar seperti tersebut di atas. Sehingga pada akhirnya, GGD terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk membeli bahan dan alat yang dibutuhkan.

Metode mengajar kelas bawah dengan cara menghiasi kelas seperti disebut di atas, selain mempercepat siswa belajar berhitung dan membaca juga menjadikan siswa lebih betah berada di kelas. Bagi siswa kelas bawah, kelas yang dihiasi warna-warni menjadi tempat bermain yang menyenangkan sehingga mereka lebih semangat datang ke sekolah. Menurut pengakuan GGD, metode ini cukup efektif meningkatkan kehadiran siswa di kelas.

Metode mengajar GGD yang inovatif menjadi contoh bagi guru-guru lain, dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Metode belajar yang diterapkan oleh GGD tergolong inovasi baru bagi guru-guru lokal. Guru-guru lokal secara sukarela membantu mempersiapkan alat bantu belajar yang dibutuhkan oleh GGD. Selain itu, antara GGD dengan guru-guru lain di sekolah penempatan biasa berbagi pengetahuan dan pengalaman mengajar di sela-sela waktu istirahat. Menurut pengakuan GGD, dirinya juga sering dimintai tolong oleh rekan-rekan guru lain berkenaan dengan operasi komputer dan IT. Selain itu, GGD sering juga dimintai konsultasi oleh rekan-rekan guru lain terkait kurikulum seperti penyusunan silabus, RPP, dan lain-lain. Namun secara formal, forum berbagi pengalaman dan pengetahuan biasa dilakukan dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang diselenggarakan secara rutin setiap tiga bulan. Disamping itu, menurut pengakuan Kepala sekolah, keberadaan GGD juga menjadi motivasi bagi guru-guru lain untuk meningkatkan kompetensinya. Saat ini banyak guru-guru honor yang sedang menempuh pendidikan S1 di UT.

Suasana belajar yang menarik dan menyenangkan yang dilakukan oleh GGD dinilai berhasil menurunkan tingkat pekerja anak di jam-jam belajar. Menurut pengakuan kepala sekolah, ada perubahan semangat belajar pada siswa yang diajar oleh GGD. Jika sebelumnya, mereka sering kali tidak masuk sekolah karena memilih bekerja, terutama di saat musim panen dan musim tanam, kini jarang siswa yang tidak masuk sekolah karena alasan bekerja. Menurutnya, tingkat pekerja anak di daerahnya cukup tinggi karena pemilik ladang lebih tertarik menggunakan tenaga kerja anak-anak dibandingkan orang dewasa. Tenaga kerja anak dianggap lebih efisien, selain karena upahnya murah, sekali saja mereka disuruh bekerja, mereka menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Sementara tenaga kerja dewasa, selain upahnya lebih tinggi, waktu mereka bekerja banyak terbuang untuk istirahat dan mengobrol bersama sesama pekerja sambil merokok.

Menurut pengakuan salah satu GGD, dirinya sering menyampaikan kepada orang tua siswa agar anak-anaknya jangan diajak bekerja, terutama pada jam-jam belajar. Namun menurut pengakuan para orang tua, mereka tidak menyuruh anak-anaknya bekerja. Hanya saja anak-anak bekerja atas kemauan sendiri karena tergiur dengan upah yang ditawarkan. Memang setelah ada GGD, pekerja anak tidak hilang walau suasana belajar di kelas saat ini, jauh lebih menarik dibandingkan di luar sekolah. Namun yang berubah adalah jam bekerja anak yang bergeser dari jam-jam belajar menjadi jam pulang sekolah hingga sore hari. Dengan demikian si anak tetap memperoleh pendapatan tanpa harus meninggalkan kelas.

### 4.3.3 Aspek kehidupan GGD dan interaksi dengan masyarakat

Diperkirakan pengeluaran CPNS GGD per bulan berkisar antara 2,3 juta sd 2,4 juta atau sebesar 39% sampai dengan 41% dari total uang yang diterima (*take home fee*) mereka. Sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup yang bisa ditabungkan oleh GGD bisa mencapai Rp 3,5 juta. Pengeluaran GGD untuk makan sehari-hari bisa juga berkurang dengan bantuan warga untuk keperluan beras dan lauk. Hal itu tergantung pada kedekatan dengan warga setempat. Tapi menurut pengakuan salah seorang guru GGD, tunjangan profesi dan tunjangan khusus diterima 3 bulan sekali. Itupun kadang diterima baru pada bulan ke 5.

**Tabel 9 Contoh Pendapatan dan Pengeluaran Guru Garis Depan (GGD)**

	Guru A	Guru B	Guru C
	Perempuan lajang	Perempuan menikah 1 anak balita	Laki-laki menikah belum punya anak
<b>Pendapatan per bulan</b>			
Gaji Pokok CPNS (90% gaji pokok PNS)	1,956,360	1,956,360	1,956,360
Tunjangan Profesi (1 x gaji pokok)	1,956,360	1,956,360	1,956,360
Tunjangan Khusus 3T (1 x gaji pokok)	1,956,360	1,956,360	1,956,360
<b>Total pengeluaran</b>	<b>5,869,080</b>	<b>5,869,080</b>	<b>5,869,080</b>
<b>Perkiraan pengeluaran per bulan</b>			
sewa rumah di kota Waingapu		1,000,000	1,000,000
kost di kota kecamatan (tidak dapat mes)	400,000	-	-
Biaya makan & minum	900,000	300,000	700,000
Biaya transportasi/cicilan motor	900,000	300,000	400,000
makanan & susu bayi	-	450,000	-
Biaya kesehatan	-	-	-
Biaya Komunikasi (pulsa tlp dan paket data)	100,000	150,000	200,000
Biaya lain-lain		200,000	-
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,300,000</b>

Keberadaan tempat tinggal Bersama (mes) bagi kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah di lingkungan sekolah dapat mempererat interaksi antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah. GGD yang tinggal di mes sekolah mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan warga sekitar sekolah. Sekolah penempatan GGD yang memiliki mes bagi guru dan kepala sekolah, masyarakatnya cenderung lebih peduli dengan kondisi sekolah dibandingkan dengan yang tidak memiliki mes. Menurut pengakuan kepala sekolah yang tinggal di mes, masyarakat di sekitar sekolah sangat mendukung kegiatan sekolah. Keperluan perbaikan sekolah selalu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Begitu pun jika sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan siswa seperti perlombaan di sekolah, masyarakat sekitar secara suka rela menyumbang untuk keperluan konsumsi dan lain-lain. Keberadaan mes di sekolah dapat merekatkan hubungan antara GGD dengan warga sekitar. Seringkali warga berkunjung ke mes untuk sekedar ngobrol untuk lebih mengenal GGD yang mengajari anak-anak mereka.

Berbeda dengan cerita kepala sekolah yang tidak memiliki mes, menurutnya, kepedulian masyarakat sekitar terhadap sekolah sangat rendah. Sesekali pihaknya meminta sumbangan kepada masyarakat sekitar untuk keperluan perbaikan pagar sekolah, tidak ada satu pun masyarakat yang mau menyumbang. Alasannya karena sekolah sudah memperoleh dana dari pemerintah. Kepala sekolah menyadari bahwa interaksi dia dengan masyarakat sekitar sangat jarang karena ia tinggal di rumah kos di kota kecamatan yang berjarak 25 km dari lokasi sekolah. Tidak adanya mes di sekolah juga dirasakan berat oleh GGD karena ia terpaksa harus indekos di kota kecamatan. Sementara perjalanan bolak-balik sekolah – tempat indekos yang jaraknya jauh menyita waktu dan menguras tenaga sehingga dapat mempengaruhi proses mengajar. Selain itu, dengan indekos, GGD harus mengeluarkan uang tambahan untuk bayar sewa dan uang bensin untuk transport bolak-balik sekolah – tempat kost yang jumlahnya cukup besar.

Perbedaan budaya dan agama GGD dengan masyarakat di sekolah penempatan sedikit menghambat interaksi dengan masyarakat sekitar. Seorang GGD beragama islam yang berasal dari jawa timur mengaku dirinya butuh waktu hingga tiga bulan untuk bisa berinteraksi secara normal dengan warga sekitar sekolah. Masyarakat setempat semuanya beragama katolik dan masing-masing rumah memelihara anjing dan babi sehingga ia takut untuk berkunjung ke rumah-rumah warga.

Berbeda dengan GGD yang berasal dari tanah toraja, ia seorang katolik sehingga tidak ada masalah untuk berada di tengah-tengah warga sekitar karena merasa seiman. Namun yang ia keluhkan budaya masyarakat setempat yang tidak mementingkan pendidikan anak. Masyarakat setempat pada umumnya mempunyai kebiasaan buruk minum minuman keras di kalangan pria dan kebiasaan merokok di kalangan ibu-ibu. Bahkan jika anaknya mendapatkan bea siswa, tak jarang uang beasiswa digunakan membeli minuman keras dan rokok.

Bagi GGD muslim yang ditempatkan di daerah berpenduduk non muslim, kebutuhan menunaikan ibadah sholat jumat menyebabkan mereka terpaksa harus meninggalkan kelas di hari jumat. Di Sumba Timur bagian selatan, lokasi mesjid terdekat hanya di berada di kota Waingapu yang berjarak setengah hari perjalanan. Untuk mencapai mesjid tepat di waktu jumat, GGD harus memulai perjalanan dari hari kamis. Dengan demikian bisa dua hari (kamis dan jumat) GGD meninggalkan kelas untuk menunaikan ibadah sholat jumat.

## **Cerita Ibu Lola, Seorang Guru Garis Depan**

Bu Lola panggilannya, seorang ibu muda beranak satu, GGD asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Sebelum mendaftar CPNS GGD, ia merupakan alumni program SM3T yang ditugaskan di Papua. Mentalnya memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala keterbatasan di daerah 3T. Namun Tidak pernah terbayangkan olehnya, di hari pertama penempatan GGD, ia harus melintasi derasny sungai selebar 20 meter untuk mencapai sekolah penempatan di desa Umamanu kecamatan Lewa Tidahu kabupaten Sumba Timur. Saat itu, ketinggian air sungai sedada orang dewasa dengan arus yang cukup deras. Padahal di musim kemarau, sungai itu hanya menyisakan air setinggi mata kaki. Sungai itu menjadi satu-satunya akses warga keluar kampung. Alhasil jika musim hujan tiba, air sungai meluap, membuat warga terisolasi di dalam kampung hingga berminggu-minggu.

Saat itu, guru Lola baru dua bulan selepas melahirkan secara cesar. Luka luar bekas operasi baru saja pulih, namun rasa ngilu di bagian masih terasa. Untuk sampai ke sekolah menyeberangi tepian sungai, bayi guru Lola yang pertama dengan digendong oleh seorang pria penduduk lokal. Lalu guru Lola dan suami menyeberang bergantian dengan berpegangan tangan pemandu lokal. Tak banyak barang yang dibawa guru Lola saat itu. Hanya berbekal satu buah koper dan tas punggung berisi pakaian dan berkas-berkas serta kasur busa dan tempat piring yang dia beli di Kota Waingapu.

Moment di hari pertama penempatan itu tidak pernah ia lupakan. Kejadian tersebut tak sengaja diabadikan oleh salah satu kerabatnya yang turut mengantar dengan kamera Handphone. Foto dan video moment itu selalu ia simpan baik untuk bahan cerita buat anaknya setelah besar kelak, agar ia tahu perjuangan orang tuanya menjadi guru garis depan.

### **4.3.4 Peran Dinas Pendidikan**

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kehadiran GGD melalui laporan bulanan yang dibuat oleh Kepala Sekolah dan laporan hasil kunjungan pengawas sekolah. Di kab. Sumba Timur, tingkat kehadiran GGD di sekolah menjadi persyaratan pencairan tunjangan profesi berdasarkan ketentuan minimal 24 jam mengajar. Adapun Kemendikbud tidak mensyaratkan 24 jam bagi GGD untuk memperoleh tunjangan profesi selama 2 tahun penempatan. Ketentuan mengenai kelonggaran linearitas bagi GGD ditetapkan melalui surat edaran Mendikbud/Menpan RB. Ketentuan minimal 24 jam mengajar dan linearitas baru berlaku setelah GGD melewati masa 2 tahun penempatan dan otomatis menjadi PNS penuh. Seiring status GGD sebagai PNS daerah, maka tanggung jawab sepenuhnya diserahkan ke Pemda terkait. Akan tetapi Pemerintah Sumba Timur menganggap memberlakukan ketentuan 24 jam mengajar bagi GGD sejak masa awal penempatan, dirasakan cukup adil. Mengingat GGD memperoleh pendapat sebesar 3 kali gaji pokok yang mereka terima, sementara guru-guru honor di sekolah penempatan GGD sangat kecil sekali.

Ketidakhadiran GGD di kelas banyak disebabkan karena GGD mendapat tugas tambahan mengurus administrasi dan operator sekolah. Untuk mengurus administrasi sekolah seperti pemberkasan menyebabkan GGD terpaksa meninggalkan kelas untuk beberapa hari. Begitupun

untuk input data sekolah dalam dapodik diperlukan jaringan listrik dan internet yang hanya tersedia di daerah kota kecamatan yang jaraknya jauh dari sekolah. Walau demikian, Dinas Pendidikan tetap mewajibkan GGD mengganti jam mengajar, yang ditinggalkan saat perjalanan dinas, pada waktu lainnya.

Dengan dikonfirmasi terhadap pengawas sekolah, tertulis Dinas Pendidikan Sumba Timur melakukan monitoring GGD melalui pengawas sekolah dan laporan kehadiran GGD yang diberikan oleh Kepala Sekolah setiap bulan. Dinas Pendidikan memanggil GGD, yang dilaporkan sering tidak hadir di sekolah, untuk dimintai klarifikasi sekaligus pembinaan.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

---

---





## 5.1 Kesimpulan

1. Aspek perencanaan GGD telah melibatkan perencanaan teknokratis dan partisipatoris. Dari aspek teknokratis Kemendikbud menghitung kebutuhan guru dan melakukan identifikasi sekolah mana yang membutuhkan guru GGD. Dari aspek partisipatoris Kemdikbud melibatkan pemerintah daerah untuk memutuskan apakah mereka akan mendapatkan GGD atau tidak.
2. Program GGD sudah memiliki value proposition dalam hal perekrutan dan pemberian tunjangan khusus untuk mendorong minat dan meningkatkan motivasi guru.
3. Program GGD masih tergantung pada inisiatif daerah, sehingga daerah yang memiliki motivasi yang kuat untuk perbaikan manajemen guru akan mendapatkan manfaat yang besar, sementara daerah yang tidak akan kehilangan kesempatan untuk ikut.
4. Secara internal di masing-masing kabupaten, sekolah yang mendapatkan GGD bukan sekolah yang paling membutuhkan guru PNS meski sama-sama di daerah 3T. Namun hasil ini juga perlu mempertimbangkan bahwa sekolah-sekolah di 3T cenderung untuk mempunyai siswa yang sangat kecil sehingga rasio siswa guru akan terlihat besar.
5. Sekolah yang mendapatkan GGD secara signifikan meningkatkan kecukupan guru PNS di daerah tersebut. Secara kuantitas, GGD telah berperan dalam memenuhi kekurangan guru seperti tujuan awal program ini dilakukan.
6. GGD tidak berdampak terhadap rata-rata nilai UN, namun berdampak pada penurunan ketimpangan nilai UN antar siswa di dalam satu sekolah. Hal ini berarti GGD telah mendorong peningkatan prestasi siswa yang relatif kurang berprestasi dan memperkecil kesenjangan antarsiswa di dalam sekolah. Dengan demikian salah satu tujuan GGD untuk pemerataan kualitas dapat dikatakan tercapai.
7. Hasil analisis belum menemukan dampak SGD terhadap peningkatan probabilitas siswa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, baik untuk jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA. Faktor jumlah program yang masih sangat kecil menjadikan program ini belum mempunyai dampak seperti yang diharapkan. Jumlah SGD terhadap total kebutuhan penyediaan sarana prasarana untuk memenuhi terlalu kecil.
8. Untuk melihat dampak SGD, diperlukan data yang lebih granular, misalnya level kecamatan/desa untuk melihat dampak yang lebih riil.

## 5.2 Rekomendasi

1. Perlu dibangun mekanisme yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengalokasian guru GGD. Mekanisme ini berisi tentang tahapan, cara perhitungan kebutuhan per masing-masing tingkat pendidikan, mata pelajaran, dan daerah. Termasuk didalamnya kriteria untuk mendapatkan program ini. Dengan mekanisme yang akuntabel, maka setiap daerah dapat melakukan perhitungan sendiri tentang kemungkinan mendapatkan program ini, serta dapat memenuhi rasa keadilan.
2. Meski belum terbukti mendorong hasil belajar secara umum, Program GGD terbukti mampu mengurangi ketimpangan hasil belajar yang berarti mampu mendorong hasil belajar bagi mereka yang kurang berprestasi. Oleh karena itu program ini perlu diteruskan di kemudian hari, mungkin dengan berbagai perbaikan, termasuk tentang mekanisme rekrutment, alokasi dan formulasi.
3. Aspek-aspek seperti budaya, agama, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan seleksi atas guru GGD. Selain itu, latar belakang pendidikan yang nantinya berpotensi menjadi masalah dalam hubungannya dengan perolehan sertifikasi dan tunjangan profesi perlu dipertimbangkan.

# REFERENSI

- Al-Samarrai, Samer, dkk (2018, December). *Introducing a performance-based component into Jakarta's school grants: What do we know about its impact after three years?* Economics of Education Review Vol. 67 Pages 110-136.
- CARE. (2018, 11 18). [www.care.org.au/wp-content](http://www.care.org.au/wp-content/uploads/2014/12/ICDP_-_Improving_Access_to_Education.pdf). Retrieved from [www.care.org.au](http://www.care.org.au): [https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2014/12/ICDP\\_-\\_Improving\\_Access\\_to\\_Education.pdf](https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2014/12/ICDP_-_Improving_Access_to_Education.pdf)
- Chansopheak, K. (2009). The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia. In H. Y., & K. Y., *The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia* (p. 150). Springer Science dan Business Media.
- Halsey, J. (2018). *Independent Review into Regional, Rural, and Remote Education*. Commonwealth of Australia.
- Hattie, J. (2009). Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. *Routledge*.
- Heinrich, C., Maffioli, A., & Vazquez, G. (2010). *A primer for applying propensity-score matching*. Inter-American Development Bank.
- Indonesia Economic Quarterly (2018, June). Pendidikan Untuk Pertumbuhan, The World Bank.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017, Desember). Jendela Pendidikan dan Kebudayaan: Bangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran. XX.
- Lee, David S. and Lemieux, Thomas (2010, June), *Regression Discontinuity Designs in Economics*. *Journal of Economic Literature* 48: 281–355.
- Mohsen, A. (2016, 9 19). [www.quora.com/What-is-public-policy-making-process](http://www.quora.com/What-is-public-policy-making-process). Retrieved 11 25, 2018, from [www.quora.com](http://www.quora.com): <https://www.quora.com/What-is-public-policy-making-process>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Buku 1: Agenda Pembangunan Nasional Rajeev, H. D., & Sadek, W. (2002, February). Propensity Score-Matching Methods for Nonexperimental Causal Studies. *The Review of Economics and Statistics*, 84(1), 151-161.
- <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>.



# LAMPIRAN

Tabel 10 Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) per SMA

	Mean B. Ind	Mean B. Ing	Mean MTK	Mean IPA	Mean Total
GGD	1.517 -1.411	1.109 -2.068	1.813 -2.351	1.668 -1.889	3.061 -8.592
Rasio Guru-Murid	0.162** (0.057)	0.024 (0.083)	-0.038 (0.094)	-0.099 (0.076)	0.281 (0.345)
School size	0.003 (0.002)	0.001 (0.004)	0.003 (0.004)	0.007* (0.003)	0.048** (0.015)
% Ruang kelas baik	2.043 -1.735	-3.700 -2.543	-7.552** -2.891	0.070 -2.322	-21.249* -10.567
Constant	49.694*** -1.793	40.636*** -2.628	36.038*** -2.987	39.887*** -2.400	238.819*** -10.918
R-squared	0.051	-0.007	0.023	0.013	0.076
N	181	181	181	181	181

\* p<0.05, \*\* p<0.01, \*\*\* p<0.001

Tabel 11 Hasil Regresi: Ketimapanagn Nilai Ujian Nasional (UN) Intra-Sekolah SMA

	Std B. Ind	Std B. Ing	Std MTK	Std IPA	Std Total
GGD	-0.316 (0.400)	-0.473 (0.410)	-1.269 (0.696)	-0.903 (0.620)	-0.087 -1.130
Rasio Guru-Murid	-0.071*** (0.016)	0.011 (0.016)	-0.038 (0.028)	-0.023 (0.025)	-0.053 (0.045)
School size	0.003*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.005*** (0.001)	0.006*** (0.001)	0.011*** (0.002)
% Ruang kelas baik	0.394 (0.491)	1.227* (0.504)	-0.222 (0.856)	-0.921 (0.762)	1.251 -1.389
Constant	10.940*** (0.508)	6.310*** (0.520)	8.567*** (0.884)	5.747*** (0.788)	22.008*** -1.435
R-squared	0.145	0.172	0.092	0.172	0.136
N	181	181	181	181	181

\* p<0.05, \*\* p<0.01, \*\*\* p<0.001

Tabel 12 Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) per SMK

	Mean B. Indo	Mean B. Ing	Mean MTK	Mean IPA	Mean Total
GGD	-0.391	1.386	-0.191	-1.560	-0.755
	-1.855	-2.896	-3.432	-1.416	-7.494
Rasio guru-murid	0.115	-0.142	-0.065	-0.309*	-0.401
	(0.198)	(0.309)	(0.366)	(0.151)	(0.799)
School size	0.001	-0.013*	-0.016*	0.002	-0.026
	(0.004)	(0.006)	(0.007)	(0.003)	(0.015)
% Ruang kelas baik	0.203	-4.549	-4.340	1.544	-7.142
	-2.316	-3.616	-4.285	-1.768	-9.357
Constant	53.228***	46.854***	43.915***	75.626***	219.623***
	-2.295	-3.583	-4.246	-1.752	-9.272
R-squared	-0.043	0.122	0.103	0.051	0.058
N	68	68	68	68	68

\* p<0.05, \*\* p<0.01, \*\*\* p<0.001

Tabel 13 Hasil Regresi: Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) Intra-Sekolah SMK

	Std B. Indo	Std B. Ing	Std MTK	Std IPA	Std Total
GGD	-0.241	-0.583	-0.030	-0.123	-0.654
	(0.588)	(0.624)	(0.666)	(0.262)	-1.335
Rasio guru-murid	0.108	-0.024	0.082	-0.028	0.077
	(0.063)	(0.067)	(0.071)	(0.028)	(0.142)
School size	0.001	0.002	0.000	0.002***	0.007*
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.003)
% Ruang kelas baik	0.661	-0.244	-0.200	-0.303	-0.532
	(0.734)	(0.779)	(0.831)	(0.328)	-1.667
Constant	9.254***	8.321***	7.518***	3.677***	18.393***
	(0.727)	(0.772)	(0.824)	(0.325)	-1.652
R-squared	0.075	-0.018	-0.028	0.219	0.114
N	68	68	68	68	68

\* p<0.05, \*\* p<0.01, \*\*\* p<0.001